

**Analisis *Matching Concept* atas Biaya Produksi
dengan Pendapatan dan Penyajiannya dalam
Pelaporan Laba Pada Perusahaan Umum
Kehutanan Negara**
(Studi pada Perum Perhutani KPH Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Oleh:

NURUL IMA AISYAH
NIM. 0510323123



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2009**

RINGKASAN

Nurul Ima Aisyah, 2009, **Analisis *Matching Concept* atas Biaya Produksi dengan Pendapatan dan Penyajiannya dalam Pelaporan Laba Pada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Studi pada Perum Perhutani KPH Malang)**, Dr. Darminto, M. Si, Drs. Nengah Sudjana, M. Si, 77 Halaman + iii v

Perusahaan dikatakan sukses atau berhasil dilihat dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Penentuan laba ini berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan penentuan beban yang berhubungan dengan usaha menghasilkan pendapatan tersebut, agar diperoleh informasi laba rugi yang tepat dan wajar maka biaya ditandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama. Proses ini disebut dengan *Matching Concept*, *Matching concept* dilakukan untuk mengidentifikasi semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi yang bersangkutan, menghitung besarnya biaya yang terjadi, serta menandingkan antara pendapatan dengan biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut selama periode tertentu. Beban tidak diakui ketika kas dibayarkan, atau ketika pekerjaan dilakukan tetapi beban diakui ketika telah berkontribusi pada pendapatan, sedangkan dalam proses pengakuan pendapatan dipengaruhi oleh waktu atau *timing* pengakuan pendapatan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan analisis kuantitatif. Penelitian ini difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan judul, yakni biaya produksi, pendapatan perusahaan, penandingan antara keduanya (*matching concept*) dan pengaruhnya terhadap laba yang disajikan dalam laporan laba rugi. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara, yakni dengan bagian keuangan dan bagian produksi, dan untuk teknik dokumentasi yaitu mempelajari laporan keuangan khususnya laporan laba rugi. Penelitian dilakukan pada PerumPerhutani KPH Malang.

Perum Perhutani KPH Malang merupakan salah satu KPH yang berada di bawah wilayah Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, dengan luas wilayah 88.848,1 hektar. Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Malang secara Administratif masuk dalam wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang seluas 82.418,20 ha dan Pemerintah Kota Batu seluas 6.429,90 ha. Pendapatan operasional Perum Perhutani meliputi pendapatan dari penjualan hasil hutan, baik berupa kayu olahan, hasil tebang maupun hasil hutan lainnya sedangkan untuk biaya produksi adalah rekapitulasi beban-beban untuk memproduksi kayu tebang, kayu olahan dan hasil hutan lainnya. Pada tahun 2008 pendapatan yang diterima oleh Perum Perhutani KPH Malang, merupakan hasil penyerahan Kayu Jati dan Kayu Rimba. Biaya produksi untuk tahun ini terjadi karena adanya produksi komoditi utama perusahaan, yaitu Kayu Jati dan Rimba.

Berdasarkan hasil analisis penerapan *matching concept* pada produksi dan pendapatan untuk produksi Kayu Jati kurang dapat diterapkan sepenuhnya karena biaya produksi tahun berjalan diakui seluruhnya, sementara ada bagian produksi yang tidak memberikan kontribusi kepada pendapatan pada tahun tersebut.

Sedangkan untuk pengakuan biaya produksi dan pendapatan dari produksi Kayu Rimba, *matching concept* diterapkan secara layak dengan diakuinya seluruh biaya produksi yang dapat dikaitkan dengan seluruh total kontribusi pendapatan dan produk Kayu Rimba. Dengan diakuinya biaya produksi yang tidak memberikan kontribusi kepada pendapatan pada tahun berjalan. Laba perusahaan yang disajikan di dalam laporan keuangan untuk tahun bersangkutan menjadi lebih rendah (*understated*) dan tidak mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Matching Concept atas Biaya Produksi dengan Pendapatan dan Penyajiannya dalam Pelaporan Laba Pada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Studi Pada Perum Perhutani KPH Malang)**”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Sarjana Ilmu Administrasi (SAB) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sumartono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Dr. Kusdi Rahardjo, DEA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Drs. Rustam Hidayat, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Darminto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
5. Drs. Nengah Sudjana, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
6. Seluruh Dosen Pengajar Administrasi Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Pimpinan/Administratur, staf dan pegawai Perum Perhutani KPH Malang, yang telah berkenan memberikan ijin dan bantuan selama proses penelitian.
8. Keluarga tercinta yang telah memberikan semangat dan doa yang tiada henti sampai terselesainya skripsi ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2005, khususnya untuk angkatan 2005 Jurusan Administrasi Bisnis Kelas C yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan pada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kontribusi Penelitian	3
E. Sistematika Pembahasan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Akuntansi	5
B. Konsep Penandingan (<i>Matching</i>)	7
1. Pengertian Penandingan (<i>Matching</i>)	7
2. Penerapan Penandingan (<i>Matching</i>)	8
C. Konsep Beban	10
1. Pengertian Beban	10
2. Pengukuran Beban	11
3. Pengakuan Beban	12
D. Konsep Pendapatan	13
1. Pengertian Pendapatan	13
2. Pengukuran Pendapatan	14
3. Pengakuan Pendapatan	15
E. Konsep Laba	18
1. Pengertian Laba	18
2. Tujuan Pelaporan Laba	19
3. Konsep Laba	20
F. Laporan Keuangan	23
1. Pengertian Laporan Keuangan	23
2. Tujuan Laporan Keuangan	23
3. Jenis Laporan Keuangan	26

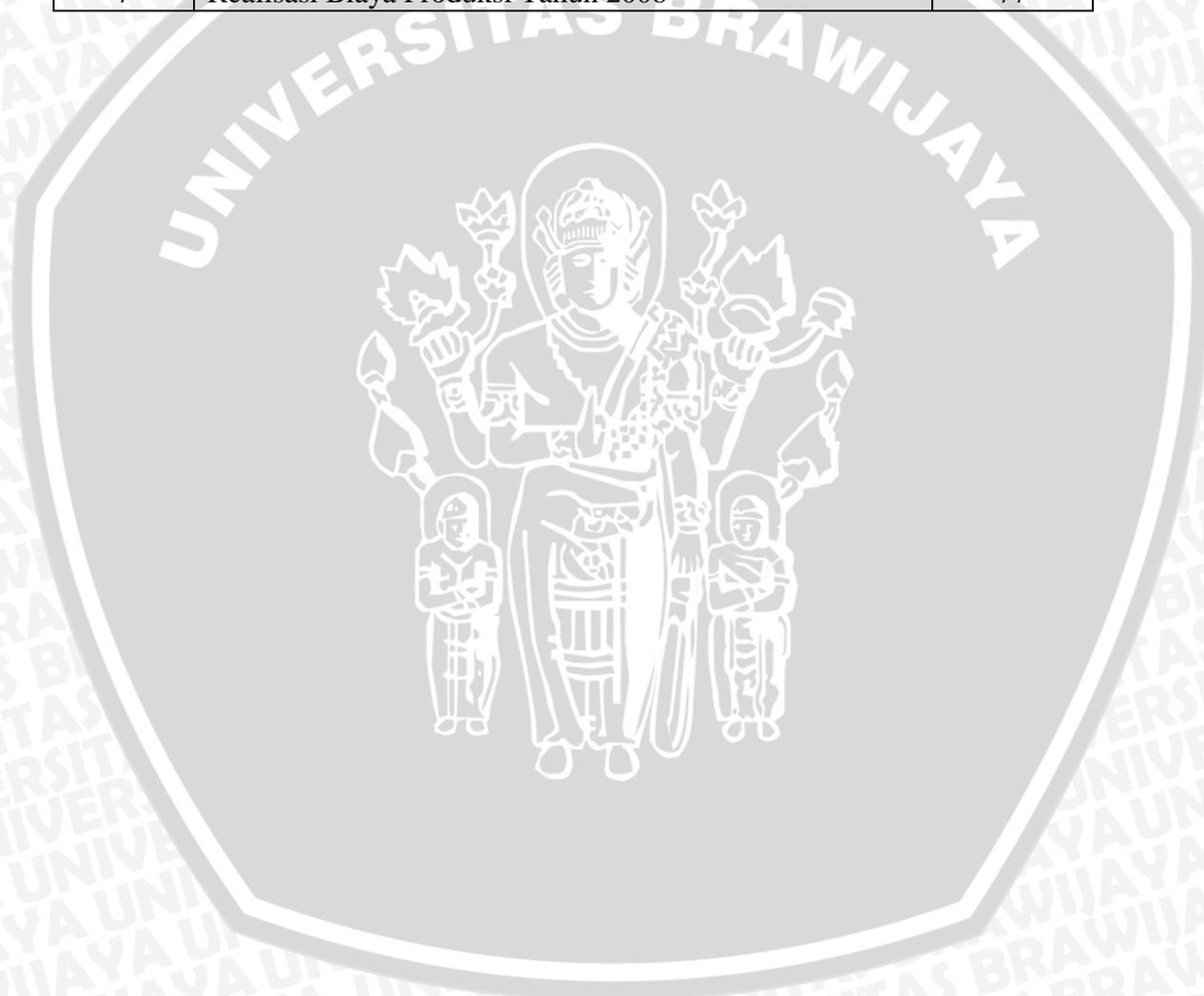
4. Unsur-unsur Laporan Keuangan	26
G. Definisi Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan Istilah Kehutanan	27
1. Definisi Perusahaan Umum Kehutanan Negara	27
2. Istilah-Istilah Aktivitas Kehutanan Negara	29
H. Pengakuan Pendapatan Dan Beban Untuk Pendapatan Dari Hasil Hutan	32
1. Pendapatan	32
2. Beban	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	35
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Perusahaan	39
1. Sejarah Singkat Perusahaan	39
2. Lokasi Perusahaan	41
3. Situasi Areal Kawasan Hutan dan Fungsinya	41
4. Struktur Organisasi Perusahaan	43
5. Proses Produksi	44
6. Kebijakan Akuntansi Perusahaan	48
7. Laporan Keuangan	50
8. Proyeksi Produksi, Pendapatan dan Biaya	51
9. Realisasi Produksi	55
B. Analisis Data	55
1. Analisis Pengakuan Pendapatan	55
2. Analisis Pengakuan Beban	59
3. Analisis Penerapan <i>Matching Concept</i>	63
4. Penyajian Penerapan <i>Matching Concept</i> dalam Pelaporan Laba	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

No.	JUDUL	Hal.
4.1	Pembagian Luas Wilayah Kerja Perum Perhutani	40
4.2	Kawasan Hutan dan Fungsinya	42
4.3	Luas Areal Produksi KPH Malang	42
4.4	Rencana Volume Penyerahan Hasil Hutan	52
4.5	Estimasi Harga Rata-rata Penyerahan Hasil Hutan	52
4.6	Rencana Pendapatan Penyerahan Hasil Hutan	53
4.7	Proyeksi Biaya Produksi	54
4.8	Realisasi Pendapatan Penyerahan Hasil Hutan	56
4.9	Realisasi Penyerahan Kayu Jati	56
4.10	Realisasi Penyerahan Kayu Rimba	57
4.11	Realisasi Volume Hasil Kayu Tebangan & Penyerahan Hasil Kayu Tebangan	58
4.12	Realisasi Biaya Produksi Kayu Jati	60
4.13	Realisasi Biaya Produksi Kayu Rimba	61
4.14	Realisasi Biaya Usaha	62
4.15	Perhitungan L/R Kotor untuk Hasil Hutan Kayu Jati dan Rimba	66
4.16	Penerapan MC terhadap Perhitungan L/R Kotor untuk HH Kayu Jati dan Rimba	67

DAFTAR LAMPIRAN

No.	JUDUL	Lampiran
1	Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Malang	70
2	Format Neraca Perum Perhutani	71
3	Format Laporan Laba Rugi Perumperhutani KPH Malang	72
4	Neraca Perbandingan Perumperhutani KPH Malang Tahun 2008	73
5	Laporan Laba Rugi Perum Perhutani KPH Malang Tahun 2008	75
6	Data Produksi Tebangan Kabupaten Dan Kota Batu KPH Malang Tahun 2008	76
7	Realisasi Biaya Produksi Tahun 2008	77



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan dapat dikatakan sukses atau berhasil dilihat dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Laba merupakan sejumlah kekayaan yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai keperluan tanpa mengurangi kekayaan perusahaan pada awal periode. Penentuan laba ini berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan penentuan beban yang berhubungan dengan usaha menghasilkan pendapatan tersebut, agar diperoleh informasi laba rugi yang tepat dan wajar maka biaya ditandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama. Proses ini disebut dengan *Matching Concept*, yaitu konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya (Chariri, Ghozali. 2007:325).

Matching concept dilakukan untuk mengidentifikasi semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi yang bersangkutan, menghitung besarnya biaya yang terjadi, serta menandingkan antara pendapatan dengan biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut selama periode tertentu. Penandingan antara biaya dan pendapatan memerlukan dasar yang tepat. Dasar penandingan ini digunakan untuk meminimalkan masalah utama dalam *matching concept*, yaitu penentuan dasar alokasi yang tepat untuk mencari hubungan antara biaya dengan pendapatan dalam suatu periode tertentu.

Matching concept sangat erat kaitannya dengan pengakuan pendapatan dan beban. Dalam konsep ini dinyatakan bahwa beban harus dikaitkan dengan pendapatan pada periode di mana usaha untuk memperoleh pendapatan dilakukan. Beban tidak diakui ketika kas dibayarkan, atau ketika pekerjaan dilakukan tetapi beban diakui ketika telah berkontribusi pada pendapatan. Seperti yang tercantum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2007: Par. 95) dalam Standar Akuntansi Keuangan, "Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of cost with revenue*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban

secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama”.

Proses pengakuan pendapatan dipengaruhi oleh waktu atau *timing* pengakuan pendapatan dan karakteristik bidang usaha yang dijalankan. Setiap metode pengakuan pendapatan menggunakan *timing* yang berbeda dan digunakan pada karakteristik usaha yang berbeda pula. Agar pengakuan ini dapat dilakukan secara benar, maka metode yang digunakan juga disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan. Untuk menentukan kapan pendapatan diakui, biasanya didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Penggunaan kriteria ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang relevan dan dapat dipercaya. Secara umum, ada dua kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Menurut FASB (1980) seperti yang diikuti Chariri, Ghozali (2007:303) yaitu, telah terealisasi (*realized*) dan telah terbentuk (*earned*).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam proses penerapan *matching concept* pada Perusahaan Umum Kehutanan. Perusahaan Umum Kehutanan mempunyai karakteristik usaha yang khusus terutama dalam kaitannya dengan pengakuan pendapatan dan beban. Perusahaan Umum Kehutanan Negara mempunyai beberapa sifat khas yang membedakannya dengan perusahaan pemanfaatan lahan yang lain, yaitu waktu yang sangat panjang untuk mencapai saat pemanenan serta pengelolaan hutan yang didasarkan pada asas kelestarian sumberdaya hutan. Kedua hal tersebut mendorong perlunya pengaturan hasil hutan agar kegiatan pemungutan hasil hutan dapat dilakukan terus menerus serta tetap menjaga rotasi daur kelestarian tanaman hutan. Sesuai dengan tujuan pengaturan hasil hutan tersebut tentunya terdapat biaya atau pengeluaran yang ada dalam proses produksi, baik biaya penanaman, pemeliharaan sampai masa panen, dimana kesemuanya itu berhubungan dengan periode akuntansi yang lamanya lebih dari satu periode.

Hal-hal tersebut di atas tentunya memberi pengaruh yang signifikan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan, dimana laporan keuangan dituntut untuk dapat mencerminkan secara wajar kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan untuk periode tertentu. Dampak tersebut dapat dirasakan terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah pengakuan berbagai

komponen yang membentuk laporan keuangan tersebut sebagai langkah awal dalam proses pelaporan keuangan. Perusahaan Umum Kehutanan seperti halnya perusahaan pada umumnya, pada setiap periode menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan untuk menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dengan melihat permasalahan penandingan atas biaya dan pendapatan tersebut di atas serta adanya karakteristik khusus Perusahaan Umum Kehutanan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maka penulis mengambil judul “**Analisis *Matching Concept* atas Biaya Produksi dengan Pendapatan dan Penyajiannya dalam Pelaporan Laba Pada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Studi Pada Perum Perhutani KPH Malang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *matching concept* atas biaya produksi dengan pendapatan pada Perum Perhutani KPH Malang?
2. Bagaimana pengaruh *mathcing concept* tersebut terhadap penyajian laba pada tahun berjalan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Menganalisis penerapan *matching concept* atas biaya produksi dengan pendapatan pada Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
2. Mengetahui pengaruh penerapan *matching concept* terhadap penyajian laba pada Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

D. Kontribusi Penelitian

a. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar bagi penulis, khususnya mengenai pengakuan pendapatan dan beban serta penandingan (*matching*) antara keduanya. Sedangkan bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai alternatif masukan dalam penyajian pos pendapatan dan beban yang menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

b. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang melandasi untuk melakukan penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan secara teoritis berdasarkan literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Masalah yang dibahas adalah mengenai definisi dan akuntansi Perusahaan Umum Kehutanan Negara, konsep dasar akuntansi, laporan keuangan, konsep pendapatan, konsep beban, konsep pengaitan (*matching*) beban dan pendapatan, konsep laba.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan, pengumpulan data yang berupa lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta analisis data yang dipakai.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang gambaran umum Perum Perhutani KPH Malang, serta dilakukan analisis pengakuan pendapatan, analisis pengakuan beban, analisis penerapan konsep penandingan (*matching*) beban dengan pendapatan pada suatu periode akuntansi beserta pengaruhnya terhadap laba perusahaan pada periode tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil-hasil yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Serta saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Akuntansi

Teori akuntansi merupakan penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip luas yang memberikan kerangka acuan umum yang dapat digunakan untuk menilai praktek akuntansi memberi arah pengembangan prosedur dan praktek baru. Hal ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh Hendriks dalam Chariri, Ghozali (2007:53), sebagai berikut:

“Penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas (*a set of broad principle*) yang (1) memberikan rerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan praktik dan prosedur akuntansi yang baru”.

Sedangkan Harahap (2004:2) mendefinisikan teori akuntansi sebagai berikut:

“Teori akuntansi adalah susunan konsep, definisi, dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang mungkin akan muncul”.

Tujuan teori akuntansi adalah untuk memperoleh pemahaman tentang akuntansi keuangan secara praktek dan konseptual, memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dan menilai praktek akuntansi yang sedang berjalan, serta memberikan kemampuan untuk mengembangkan praktek-praktek akuntansi di masa yang akan datang, paling tidak dapat memberikan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan untuk transaksi-transaksi yang belum diatur oleh standar akuntansi.

Proses perumusan suatu teori memerlukan kerangka acuan teori akuntansi yang didasarkan pada seperangkat unsur atau elemen yang saling berhubungan yang mengatur perkembangan teori akuntansi, yang disebut teori dasar akuntansi. Berkaitan dengan hal itu Soemarso (2005:359) mengungkapkan konsep dasar akuntansi sebagai berikut:

1. Kesatuan Akuntansi
2. Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)
3. Ukuran Uang
4. Harga pertukaran

5. Periode Akuntansi
6. Penetapan Beban dan Pendapatan

Berikut ini Konsep Dasar yang berkaitan dengan *Matching Concept* antara biaya dengan pendapatan adalah asumsi kesinambungan (*going concern*), periode akuntansi, pengukuran nilai uang, dan penetapan pendapatan dan beban yang dikutip dari Chariri, Ghozali (2007:173-175). Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Kesinambungan (*Going Concern*)

Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan itu akan hidup terus, dalam arti diharapkan tidak akan terjadi likuidasi di masa akan datang. Oleh karena itu, laporan keuangan memberikan suatu pandangan sementara mengenai situasi keuangan perusahaan dan hanya merupakan bagian dari serangkaian laporan yang berkesinambungan.

2. Periode Akuntansi (*The Accounting-Periode Postulate*)

Kegiatan perusahaan dianggap berjalan terus dari periode ke periode, sehingga hasil sebenarnya dari kegiatan perusahaan hanya dapat diketahui bila perusahaan dihentikan (likuidasi). Namun demikian, pihak tertentu seperti manajemen atau pemakai lainnya memerlukan informasi yang tepat waktu untuk mengendalikan jalannya perusahaan dan pengambilan keputusan.

3. Pengukuran Nilai Uang

Mengingat peranan khusus unit moneter sebagai alat pengukur/pertukaran di dalam perekonomian, akuntansi keuangan menggunakan uang sebagai denominator umum dalam pengukuran aktiva dan kewajiban perusahaan beserta perubahannya tanpa mengesampingkan informasi non moneter.

4. Penetapan Beban Dan Pendapatan

Penentuan laba periodik pada dasarnya menyangkut dua masalah, yaitu pengakuan pendapatan selama periode dan penentuan beban yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Pendapatan dihitung sesuai dengan prinsip realisasi, yaitu pada saat transaksi pertukaran telah terjadi, sedangkan pembebanan biaya sedapat mungkin dihubungkan dengan pendapatan dan di laporkan dalam periode diakuinya pendapatan.

B. Konsep Penandingan (*Matching*)

1. Pengertian Penandingan (*Matching*)

Konsep penandingan (*matching concept*) yang berhubungan dengan dasar akuntansi akrual, menyarankan dalam menandingkan beban dengan pendapatan pada laporan laba rugi harus pada periode yang sama. Dengan kata konsep ini mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait pada periode yang sama. Ketika sebuah asumsi yang menyatakan bahwa seluruh umur ekonomis suatu perusahaan dapat dibagi ke dalam beberapa periode akuntansi, maka prinsip pengakuan pendapatan dan penandingan dapat diaplikasikan.

Penandingan adalah prinsip yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut, agar dihasilkan besarnya laba yang tepat.

Beberapa definisi mengenai *matching concept* yang dikemukakan para ahli:

a. Warren and Reeve (1999:98)

“The accounting concept that supports reporting revenues and the related expenses in the same periode is called the matching or matching principle”.

b. Suwardjono (2008:409)

“Matching concept adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan biaya sehingga laba yang dihasilkan bermakna”.

c. Horngren and Harrison (2005:95)

“Matching principle is identify all expenses incurred during the periode, measure the expenses and match them againts the revenues earned during that same time periode”.

Dari definsi di atas dapat disimpulkan bahwa *matching concept* adalah proses penandingan atau pengaitan biaya dengan pendapatan yang melibatkan pengakuan pendapatan dan beban secara bersamaan yang dihasilkan secara

langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama berdasarkan hubungan sebab akibat. Konsep ini bertujuan untuk menetapkan laba bersih secara tepat dan wajar yang mencerminkan hasil operasi perusahaan pada periode tertentu.

2. Penerapan Matching Concept

Konsep penandingan (*matching*) adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan biaya sehingga laba yang dihasilkan bermakna. Konsep penandingan ini menjadi suatu kebutuhan dalam akuntansi seperti diungkapkan oleh Suwardjono (2008:410), karena:

- a. Pengakuan pendapatan tidak langsung dikaitkan dengan pengakuan biaya karena teknik pembukuan yang tidak memungkinkan hal tersebut, oleh karena itu proses penandingan dilakukan pada akhir tahun.
- b. Transaksi terjadinya pendapatan pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan transaksi terjadinya biaya.

Dari dua kebutuhan dapat diketahui bahwa masalah penandingan terletak pada penentuan dasar yang memuaskan untuk menyatukan pendapatan dan beban. Penandingan yang tepat harus didasarkan pada kelayakan ekonomi bukan ukuran fisik.

Menurut FASB dalam Suwardjono (2008:410), mengemukakan kriteria yang perlu diperhatikan dalam *matching concept* adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan atau asosiasi dengan pendapatan.
- b. Biaya diakui/dilaporkan dalam periode yang sama dengan periode diakui/dilaporkannya pendapatan.

Proses *matching* adalah proses penentuan laba dengan cara menentukan dahulu pendapatan untuk suatu periode dan barulah kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Dalam proses penandingan ini harus dicari hubungan yang tepat antara beban dan pendapatan yang diakui disertai dengan prosedur yang cermat dan pengumpulan data yang teliti. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses *matching* karena terdapat kemungkinan proses *matching* tidak selalu layak diterapkan, disebabkan tidak semua beban menghasilkan pendapatan atau dapat juga karena perolehan dan pembayaran tidak secara bersamaan dengan proses penjualan dan penagihan untuk produk yang

sama. Oleh karena itu diperlukannya seperangkat kriteria dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaporan.

Menurut Vernon Kam (1990) dalam Chariri, Ghozali (2007:327), mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar dalam *matching concept*, yaitu:

a. Hubungan sebab akibat (*association of causes and effects*)

Dasar yang paling ideal dalam menandingkan beban dan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Hal ini menunjukkan bahwa barang/jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Inilah yang disebut dengan penandingan langsung.

b. Alokasi sistematis dan rasional (*systematic and rational allocation*).

Alokasi sistematis dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik (*period matching*) atau penandingan tidak langsung. Atas dasar penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk (unit fisik) tetapi periode. Dengan demikian, biaya diakui dan dihubungkan dengan pendapatan pada periode terjadinya. *Cost* yang terjadi dapat dialokasikan dalam beberapa periode dan dapat juga langsung diakui dan dibebankan sebagai biaya. Pemilihan terhadap dua alternatif tersebut tergantung pada keadaan yang melandasi timbulnya *cost* tersebut.

Adapun alasan yang mendukung pemakaian alokasi sistematis dan rasional. Pertama, banyak *cost* periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan dengan demikian, tidak ada penyimpangan yang material dalam prinsip penandingan apabila biaya diakui pada saat barang/jasa digunakan atau dijual. Kedua, pada beberapa kasus sulit mencari hubungan langsung antara *cost* tertentu dengan pendapatan. Apabila *cost* dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka *cost* tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Ketiga, apabila manfaat masa mendatang tidak dapat diukur dengan cukup pasti atau *cost* yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan di masa mendatang, maka tidak ada alasan untuk menunda pembebanan *cost* sebagai biaya pada periode terjadinya.

Keempat, apabila biaya bersifat rutin (*reguler*) dan terjadi berulang-ulang, maka pembebanan langsung secara material tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih, meskipun penandingan yang tepat tidak dapat dicapai. Kelima, apabila *cost* tersebut merupakan *Joint-Cost*, maka alokasi arbitrer harus dilakukan pada kegiatan yang berbeda. Apabila alokasi *cost* dilakukan mencakup periode yang berbeda, sebaiknya tidak dilakukan alokasi arbitrer. Hal ini disebabkan alokasi tersebut akan memberikan hasil yang lebih menyesatkan daripada tidak dilakukan alokasi.

c. **Pembebanan Segera (*immediate recognition*)**

Pada dasar penandingan ini, *cost* dibebankan langsung pada periode terjadinya. Alasan yang mendasari dasar ini adalah kepraktisan. Hal ini dilakukan apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan *cost* dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional.

Ikatan Akuntansi Indonesia mengatur *matching concept* ini dalam Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan (2007:Par. 95). Komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan (*cost or expenses of goods sold*) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang

C. Konsep Beban

1. Pengertian Beban

Beban (*expenses*) dapat dikatakan sebagai *cost* yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan. Disini tersirat dua pengertian, yaitu: (1) adanya pemakaian atau penghabisan barang dan jasa, dan (2) nilai-nilai dari barang dan jasa ini menjadi habis pada saat produk perusahaan ditransfer pada pembeli.

Definisi beban yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

a. SFAC No,6. FASB (Par.80)

Expenses are outflows other using up of asset or incurrence of liabilities (or combination of both) from delivering or producing goods, rendering service, or carrying out other activities that constitute the entity's ongoing major or central operations (Suwardjono,2008:398).

b. Soemarso (2005:234).

Beban adalah penurunan modal bruto, sehubungan dengan kegiatan perusahaan. Penurunan modal bruto dapat terjadi melalui penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban.

c. Standar Akuntansi Keuangan dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan (2007:Par. 70).

Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa beban adalah pengeluaran uang atau prestasi yang diterima untuk menjalankan perusahaan atau proses produksi yang dipergunakan dalam rangka mendapatkan hasil yang diinginkan. Biaya ini merupakan beban perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya kapital/modal atau dengan kata lain beban dapat diartikan beban merupakan pemakaian aktiva atau kenaikan hutang/kewajiban atau keduanya, yang digunakan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan normal perusahaan.

2. Pengukuran Beban

Pengukuran beban mempunyai peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Kecermatan mengukur besarnya biaya akan mempengaruhi keakuratan informasi keuangan yang dihasilkan. Biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Pengukuran biaya dapat didasarkan pada:

a. *Cost History*

Cost historis merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas dasar *cost* historis, dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan dan sebagainya.

b. *Cost Pengganti/Cost Masukan Terkini (Replacement Cost/Current Input Cost)*

Cost masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva

yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya, penilaian untuk persediaan.

c. *Setara Kas (Cash Equivalent)*

Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisasikan dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama, pos aktiva berwujud biasanya menggunakan dasar penilaian ini (Chariri, Ghazali. 2007:323).

Pengukuran beban umumnya menggunakan *cost* historis yang dianggap dapat diversifikasikan, yaitu sebesar pengeluaran yang sebenarnya atau sebesar nilai barang dan jasa yang telah digunakan dalam operasi perusahaan. Namun demikian pengukuran beban dilakukan serupa dengan pengakuan pendapatan yang dilakukan. Hal ini untuk memenuhi tujuan *matching concept*, yaitu memperoleh pengukuran laba yang bersih dan tepat atas hasil operasi perusahaan. Hasil pengukuran pendapatan dengan satu metode tidak akan sama dengan hasil pengukuran dengan menggunakan metode yang lain. Begitu juga beban dengan pendapatan. Oleh karena itu metode yang digunakan untuk pengakuan kedua unsur itu harus sama sehingga relevan untuk dibandingkan.

3. Pengakuan Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kewajiban atau penurunan aktiva atau bilamana tidak terdapat manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh di masa datang yang berasal dari pemakaian barang dan jasa atau dapat juga sesuai dengan pengeluaran kas.

Menurut SFAC No.5 Par. 85, biaya dapat diakui bilamana salah satu dari dua kriteria berikut dipenuhi, yaitu:

a. *Konsumsi manfaat (consumption of benefits)*

Biaya diakui bilamana ekonomis yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang,

penyerahan atau pelaksanaan jasa atau kegiatan lain yang mempresentasi operasi utama atau sentral entitas tersebut.

- b. Lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang (*loss or lack of future benefits*)

Biaya diakui bilamana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomik (Suwardjono, 2008:407).

Pengakuan beban dihubungkan dengan dasar akuntansi yang digunakan yang meliputi *Cash Basis* dan *Accrual basis*. Dengan *Cash Basis*, beban harus dilaporkan sedekat mungkin dengan saat pengeluaran kas yang sebenarnya. Sedangkan dengan *Accrual basis*, beban harus diakui pada periode dimana pendapatan yang berkaitan diakui. Dengan *Accrual basis* diharuskan adanya proses *matching* dalam pelaporan beban.

Menurut Hendriksen (1991:183) pengakuan beban dibagi menjadi dua kelompok:

1. Dapat dihubungkan langsung dengan dengan pendapatan.
Beban yang termasuk dalam kelompok ini harus dilaporkan dalam periode diakuiinya pendapatan. Misalnya biaya penjualan dan komisi penjualan.
2. Pelaporan dalam periode yang sama pada saat pendapatan yang berkaitan dilaporkan (Berhubungan dengan periode terjadi).
Beban ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan produk perusahaan. Pembebanan pada periode terjadinya dilakukan mengingat beban tersebut tidak memberikan manfaat pada periode berjalan maupun masa mendatang. Beban yang timbul dari alokasi biaya secara sistematis sepanjang periode yang memperoleh manfaat, misalnya beban depresiasi aktiva tetap dan amortisasi aktiva tak berwujud

D. Konsep Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan, artinya sesuatu yang dihasilkan oleh potensi jasa (*cost*) yang dimiliki oleh perusahaan. Pendapatan dapat diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pihak lain. Aktiva baru tersebut merupakan aktiva penukar yang diterima perusahaan atas barang/jasa yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan kepada pihak lain.

Definisi mengenai pendapatan menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

- a. SFAC No. 6, FASB par. 78.

“Revenues are inflows or other enhancement of asset of an entity or settlements of its liabilities (or combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations (Suwardjono, 2008:353)”.

- b. Patton dan Littleton

“Pendapatan diartikan sebagai aliran masuk aktiva ke dalam perusahaan yang berasal dari pihak lain (konsumen) (Chariri, Ghazali. 2007:294)”.

- c. Standar Akuntansi Keuangan No.23 (2007:Par. 06)

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan arus masuk penambahan lain atas aktiva suatu *entitas* atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi inti. Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, baik itu keputusan untuk pembayaran deviden, keputusan investasi dan keputusan penting lainnya.

2. Pengukuran Pendapatan

Pengertian pengukuran menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan (2007:Par. 99) adalah sebagai berikut:

“Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu”.

Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk/jasa dalam suatu transaksi yang bebas (*arm’s length transaction*). Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima

dari transaksi penjualan. Ikatan Akuntansi Indonesia juga menganut prinsip yang sama yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Hal ini tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 tentang Pendapatan. Yang dimaksud nilai wajar disini adalah suatu jumlah dimana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Dasar pengukuran pendapatan tersebut dijelaskan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2007:Par. 100), dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Historis (*Historical Cost*)
Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dan imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.
- b. Biaya Kini (*Current Cost*)
Aktiva dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang.
- c. Nilai Realisasi (*Settlement Value*)
Menurut dasar nilai realisasi/penyelesaian, aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (*orderly disposal*).
- d. Nilai Sekarang (*Present Value*)
Menurut dasar nilai sekarang, aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

3. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam laporan keuangan. Masalah utama dalam penentuan waktu pengakuan pendapatan adalah titik waktu dimana pendapatan harus diakui dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Dalam penentuan waktu pengakuan pendapatan ini masih berhubungan atau dapat dikatakan tergantung dengan sifat-sifat tertentu dari suatu jenis dan kegiatan.

Pendapatan yang timbul dari kegiatan normal perusahaan memiliki identifikasi tertentu. Menurut PSAK No.23 kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi, namun dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi

tunggal supaya mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama bila transaksi tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat rangkaian transaksi tertentu secara keseluruhan. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi (PSAK. No. 23: Par. 13):

- (a) Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
- (b) Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual
- (c) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal
- (d) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut
- (e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Menurut FASB (SFAC No.5, Par. 83) dalam Suwardjono (2008:367) mengajukan dua kriteria pengakuan pendapatan yaitu:

- 1) Terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi (*realized or realizable*)
Pendapatan dapat diakui setelah pendapatan tersebut terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Pendapatan dapat dikatakan telah terrealisasi bilamana produk, barang dagangan atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas.
- 2) Terbentuk/terhak (*earned*)
Pendapatan dapat diakui setelah terbentuk. Pendapatan dapat dikatakan terbentuk bilamana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghaki manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan.

Jika pendapatan telah diakui tetapi terdapat bagian yang masih diragukan penagihannya, maka harus diakui adanya beban kerugian piutang (*bad debt expense*). Pendapatan dan beban-beban yang terkait harus dapat dikaitkan (*matched*). Jika biaya-biaya yang terkait dimasa yang akan datang tidak dapat diukur secara andal, maka pengakuan pendapatan harus ditangguhkan. Pada umumnya pengakuan pendapatan yang banyak dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. *Cash Basis* (Dasar penentuan kas)

Konsep ini mengakui suatu pendapatan pada saat uang itu diterima dan mengakui biaya pada saat uang dikeluarkan.

b. *Accrual Basis* (Dasar Akrual)

Dalam asumsi ini, pengetrapan akuntansi keuangan didasarkan tidak tunai (akrual) yang artinya dasar akrual akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagai hak serta kewajiban di masa mendatang

c. *Sales Basis* (Dasar Adanya Penjualan)

Konsep ini paling banyak digunakan dalam mengakui pendapatan, pendapatan diperoleh dan diakui pada saat terjadi penjualan walaupun uang belum diterima.

d. *Production Basis* (Atas dasar Produksi)

Konsep ini mengakui pendapatan pada saat barang tersebut dipakai (diproduksi) dan berlaku bilamana barang yang akan diproduksi tersebut benar-benar sudah terjamin di pasar (kuantitas, kualitas dan harga)

e. *Billable basis* (atas dasar faktur)

Konsep ini mengakui pendapatan pada saat faktur dari barang yang dijual sudah selesai.

f. *Accretion Basis* (Atas Dasar Pertambahan)

Pertambahan (*accretion*) umumnya digunakan untuk menunjuk kepada kenaikan nilai barang seperti ternak atau tanaman yang setiap saat dan semakin lama selalu mempunyai nilai tambah. Konsep ini jarang digunakan dan para akuntan lebih suka menunda sampai adanya suatu penjualan dalam mengakui pendapatan.

g. *Stage Of Completion* (Dasar Tingkat Penyelesaian)

Konsep ini mengakui pendapatan pada setiap waktu tertentu terhadap setiap kontrak atau kontrak kontruksi yang memakan waktu cukup lama, atau mengakui pendapatan pada waktu dimana suatu kontrak belum selesai. (Kusnadi, Sjamsudin, 2001:74-75).

Pengakuan pendapatan dilihat dari kegiatan dan peristiwa yang mendukung terjadinya pendapatan, maka secara teoritis *timing* daripada pendapatan (*revenue*) adalah sebagai berikut Chariri, Ghozali (2007: 307):

1) Pendapatan diakui selama kegiatan produksi.

Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi, meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. Prosedur yang

- digunakan adalah prosentase penyelesaian. Cara ini umumnya dijumpai pada perusahaan kontraktor yang memakan waktu beberapa periode akuntansi
- 2) Pendapatan diakui saat produk selesai
Kriteria yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan saat produk selesai adalah:
 - a. Harga jual dapat ditentukan dengan cukup tepat
 - b. Tidak diperlukan kegiatan/biaya pemasaran yang material untuk menjual produk tersebut
 - c. Cost produk sulit untuk ditentukan
 - d. Satuan-satuan persediaan dapat saling dipertukarkan (barang tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran)
 - 3) Pengakuan pendapatan pada saat penjualan
Pengakuan pendapatan pada saat penjualan didasarkan pada alasan yang mengarah pada konsep pendapatan yang diajukan oleh Paton dan Littleton (1940) sebagai berikut:
 - a. Pendapatan merupakan jumlah nominal yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan. Oleh karena itu harus diakui dan diukur pada tingkat/titik kegiatan yang menentukan dalam aliran kegiatan operasi perusahaan.
 - b. Pendapatan harus benar-benar terjadi dan didukung dengan timbulnya aktiva baru yang sah (sebaiknya berupa kas atau piutang).
 - 4) Pengakuan pendapatan pada saat kas diterima
Pengakuan pendapatan pada saat kas diterima dilakukan karena terdapat ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan piutang yang timbul dari penjualan jasa/barang, sehingga pengakuan pendapatan ditunda sampai saat diterimanya kas.

E. Konsep Laba

1. Pengertian Laba

Labanya dalam konteks akuntansi adalah dimaknai dengan *income*. Jadi istilah laba yang digunakan disini adalah *income*. Definisi laba menurut Suwardjono (2008:464), sebagai berikut:

“Laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusi kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham (dalam bentuk bunga, pajak dan deviden) tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham semula”.

Sedangkan laba menurut Kam (1990) dalam Chariri, Ghozali (2007:352) yaitu sebagai berikut:

“Laba (*income*) adalah perubahan dalam kapital perusahaan diantara dua titik waktu yang berbeda (awal dan akhir), di luar perubahan karena investasi oleh

pemilik dan distribusi kepada pemilik, dimana kapital dinyatakan dalam bentuk nilai (*value*) dan didasarkan pada skala pengukuran tertentu”.

Ikatan Akuntansi Indonesia memaknai *income* dengan istilah penghasilan. Hal ini tercantum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2007:Par. 70)

“Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan *ekuitas* yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.

Atas dasar definisi di atas laba dapat disimpulkan, laba adalah tambahan kemampuan ekonomik yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa/pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomik kapital mula-mula (awal periode). Laba merupakan sesuatu yang dianggap bagian penting dari akuntansi. Angka-angka yang terdapat didalamnya sedikit banyak digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan perusahaan dalam mengolah sumber dayanya.

2. Tujuan Pelaporan Laba

Tujuan utama pelaporan laba adalah memberikan informasi yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan, serta berguna bagi para pemakai laporan dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan perusahaan.

Tujuan yang lebih spesifik termasuk penggunaan laba sebagai alat ukur efisiensi manajemen perusahaan, penggunaan historis tentang laba sebagai suatu alat untuk memprediksi aktivitas perusahaan atau distribusi deviden pada masa akan datang, dan penggunaan laba sebagai suatu pengukuran atas keberhasilan dan sebagai suatu pedoman bagi keputusan manajerial dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Chariri, Ghozali (2007:350) sebagai berikut:

“Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi laba dapat digunakan: (a) Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertahan dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian (*rate of return on invested capital*), (b) sebagai pengukur prestasi manajemen, (c) sebagai dasar

penentuan besarnya pengenaan pajak, (d) sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, (e) sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus, (f) sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, (g) sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran, (h) sebagai dasar pembagian *dividen*”.

3. Konsep Laba

Konsep laba secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsep laba akuntansi (*Accounting Income*) dan konsep laba ekonomik (*Economic Income*), menurut Mitchel (1965) dalam Chariri, Ghozali (2007:347), menyatakan bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomi disebabkan oleh perbedaan konsep yang melandasinya. Lebih lanjut kedua konsep ini diuraikan sebagai berikut:

a. Konsep Laba Akuntansi (*Accounting Income*)

Pengertian laba berdasarkan konsep laba akuntansi adalah selisih pengukuran pendapatan dan beban. Sedangkan laba akuntansi (*accounting income*) secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan. Belkaoui (1993) menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki lima karakteristik sebagai berikut:

- 1) Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang/jasa.
- 2) Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu.
- 3) Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
- 4) Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya (*expenses*) dalam bentuk *cost historis*.
- 5) Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan (*matching*) antara pendapatan dengan beban yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut (Chariri, Ghozali. 2007:347).

Menurut Belkaoui dalam Chariri, Ghozali (2007:348), laba akuntansi mempunyai keunggulan antara lain:

- 1) Pemakai laporan keuangan masih mempercayai bahwa laba akuntansi masih bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi/fakta aktual, yang didukung bukti objektif.

- 3) Atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme. Artinya, akuntansi tidak mengakui perubahan nilai tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi.
- 4) Laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama pertanggung jawaban manajemen.

Laba akuntansi selain mempunyai keunggulan yang telah disebutkan di atas juga mempunyai manfaat, seperti disebutkan oleh Harahap (2004:263) adalah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara.
- 2) Untuk menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan.
- 3) Untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan.
- 4) Untuk menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa akan datang.
- 5) Untuk menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi.
- 6) Untuk menilai prestasi atau kinerja perusahaan/segmen perusahaan atau divisi.

b. Konsep Laba Ekonomi (*Accounting Income*)

Laba ekonomik dipandang sebagai tambahan kemakmuran yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi dengan perusahaan sebagai wadah yang akan dinikmati oleh seluruh pihak yang ada dalam unit kegiatan ekonomi tersebut. Sedangkan menurut Hick (1946), lebih spesifik mengartikan laba ekonomik sebagai jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi selama satu minggu tanpa harus mengurangi jumlah kemakmuran pada awal periode.

Schroeder dan Clark (1998) dalam Suwardjono (2008:461), yang menyatakan bahwa pada dasarnya ada tiga konsep laba yang digunakan dalam laba ekonomik, antara lain yaitu:

- 1) Laba fisik (*physic income*), merupakan laba yang berupa kenaikan dalam pemuasan keinginan manusia.
- 2) Laba riil (*real income*), merupakan laba yang berupa kenaikan kemakmuran ekonomik dan menjadi fokus pengukuran laba ekonomik.
- 3) Laba uang (*money income*), merupakan laba yang berupa kenaikan satuan uang dalam suatu periode tanpa memperhatikan pengaruh perbedaan daya beli dan menjadi fokus pengukuran laba akuntansi.

Konsep laba menurut Hendriksen (1992) dalam Harahap (2004:276) digolongkan berdasarkan perhitungan dan kepentingan pemakai laporan keuangan sebagai berikut:

1) Konsep laba sebagai pertambahan nilai (*added value*)

Konsep ini memandang laba sebagai selisih lebih dari harga jual produk dengan harga pokok barang dan jasa yang diperoleh melalui transfer. Konsep ini diterapkan pada perusahaan besar yang mempengaruhi nafkah ribuan orang dan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang sangat luas di luar kepentingan pemilik dan pemegang saham.

2) Laba bersih perusahaan (*net income*)

Konsep ini memandang laba sebagai selisih lebih pendapatan atas beban, semua keuntungan dan kerugian. Beban tidak mencakup beban bunga, pajak penghasilan dan pembagian laba yang sebenarnya. Pihak penerima laba adalah pemegang saham, pemegang obligasi dan pemerintah. Konsep ini memiliki keunggulan ditinjau dari segi pemisahan aspek keuangan perusahaan dari aspek operasi.

3) Laba bersih bagi investor

Konsep ini memandang laba sebagai selisih lebih pendapatan atas beban, semua keuntungan dan kerugian, termasuk pajak penghasilan. Pihak penerima laba adalah pemegang saham dan kreditur jangka panjang.

4) Laba bersih bagi pemilik modal residu

Konsep ini memandang laba sebagai selisih lebih pendapatan atas beban, semua keuntungan dan kerugian, termasuk beban bunga, pajak penghasilan, pembagian laba, dan *dividen preferen*. Pihak penerima laba adalah pemegang saham biasa yang ada dan yang potensial, kecuali jika pembayaran prioritas tidak dipenuhi. Laba bersih residu menunjukkan hak prioritas dan juga menunjukkan jumlah yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang hak residu.

Dari beberapa konsep yang diuraikan di atas semua konsep laba tersebut tidak sepenuhnya bisa diinterpretasikan dalam dunia nyata, tetapi pada prinsipnya laba disajikan dalam laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi

yang berguna bagi semua pemakai laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

F. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Myer dalam Munawir (2007:05) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba ditahan)”.

Sedangkan menurut Baridwan (1999:17) mengungkapkan laporan keuangan:

“Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah ringkasan proses pencatatan yang disajikan untuk memberikan informasi kepada pihak luar tentang keadaan keuangan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan seperti dinyatakan dalam APB Statement No.4 dalam Belkaoui (2000:126-127), tujuan laporan keuangan ada 3 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Khusus

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi dan perubahan lain dalam posisi keuangan.

2. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis dengan tujuan untuk:

- 1) Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan
- 2) Menunjukkan pendanaan dan investasi
- 3) Mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi komitmen
- 4) Menunjukkan basis sumber daya untuk pertumbuhan

- b. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit dengan tujuan untuk:
 - 1) Menunjukkan tingkat kembalian dividen harapan bagi investor
 - 2) Menunjukkan kemampuan operasi untuk membayar kreditor dan pemasok, menyediakan pekerjaan bagi karyawan, membayar pajak dan menghasilkan dana untuk ekspansi
 - 3) Menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian
 - 4) Menunjukkan profitabilitas jangka panjang
 - c. Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi *earnings* potensial perusahaan.
 - d. Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban.
 - e. Mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai.
3. Tujuan Kualitatif
- Tujuan kualitatif laporan keuangan antara lain adalah:
- a. Relevan, memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi.
 - b. Dapat dipahami, selain harus jelas informasi yang dipilih, juga harus dapat dipahami pemakai.
 - c. Dapat diuji kebenarannya, hasil-hasil akuntansi dibenarkan oleh ukuran-ukuran yang independen, menggunakan metode pengukuran yang sama.
 - d. Netral, informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan khusus pemakai tertentu.
 - e. Tepat waktu, berarti mengkomunikasikan informasi seawal mungkin untuk menghindari keterlambatan pembuatan keputusan ekonomi.
 - f. Dapat diperbandingkan, perbedaan-perbedaan seharusnya tidak mengakibatkan perlakuan akuntansi yang berbeda.
 - g. Kelengkapan, semua informasi yang memenuhi persyaratan tujuan-tujuan kualitatif lain harus dilaporkan

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, menekankan pada karakteristik kualitatif laporan keuangan (2007:Par. 24). Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu:

- 1) Dapat dipahami
Informasi dalam laporan keuangan harus dapat segera dipahami oleh pengguna dengan asumsi memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar (par. 25).
- 2) Relevan
Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa akan depan (par. 26). Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitas. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan (par. 30).

3) Keandalan (mencakup kejujuran, *substansi*, *netralitas*, *prudensi*, dan kelengkapan)

Informasi yang andal adalah informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (par. 31).

4) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang dapat dibandingkan adalah laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan dengan cara yang sama dengan perusahaan lain dalam industri sejenis. Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan:

- Antar periode dalam satu perusahaan untuk mengidentifikasi kecenderungan (*tren*) posisi dan kinerja perusahaan.
- Antar perusahaan dalam satu periode untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif (par. 39).

Untuk memenuhi tujuan karakteristik di atas, Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan mengemukakan Asumsi Dasar Akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dasar Akrual

Pengukuran aktiva, kewajiban, pendapatan, beban serta perubahannya diakui pada saat terjadinya, tidak pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan (Par. 22).

2. Kelangsungan Usaha

Perusahaan diasumsikan akan melanjutkan usahanya untuk waktu mendatang dan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (Par. 23).

Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan oleh manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Atas dasar tujuan tersebut,

diharapkan bahwa para pemakai laporan keuangan dapat menilai informasi yang dihasilkan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan.

3. Jenis Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang sering digunakan menurut Soemarso (2005:368) meliputi neraca, laporan, laporan laba rugi dan laba ditahan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Sedangkan Kieso dan Weygandt (2007:29), mengemukakan laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Laporan laba rugi (*income statement*), menyajikan pendapatan dan beban serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan selama suatu periode waktu tertentu.
- 2) Laporan ekuitas pemilik (*owner's equity statement*), merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama suatu periode waktu tertentu.
- 3) Neraca (*balance sheet*), melaporkan aset, kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu.
- 4) Laporan arus kas (*statement of cash flows*), merangkum seluruh informasi mengenai arus kas masuk (penerimaan-penerimaan) dan arus kas keluar (pembiayaan-pembiayaan) untuk periode waktu tertentu.

4. Unsur-unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar. Menurut karakteristik ekonominya kelompok besar ini merupakan unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (2007:Par. 49), menyatakan unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
- 2) Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

- 3) Ekuitas adalah hak residual (*residual interest*) atas aktiva perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban (aktiva bersih).

Sedangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja laporan laba rugi sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2007: Par. 70) adalah penghasilan dan beban. Unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi modal.
- 2) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

G. Definisi Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan Istilah-Istilah Kehutanan

1. Definisi Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan (Salim, 2006:40).

Definisi di atas senada dengan definisi yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Hutan adalah lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara menyeluruh merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan. Kehutanan adalah suatu kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusnya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hutan memerlukan pengelolaan dan pengawasan dalam pemanfaatan hutan agar ekosistem di dalamnya tidak mengalami kehancuran dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu diperlukan sebuah badan

organisasi yang bertugas dalam pengaturan dan pengelolaan tersebut seperti Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau Perum Perhutani.

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Departemen Pertanian Kehutanan dan Perkebunan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang kehutanan dan fungsinya merupakan sebagian unsur pemerintah negara yang dipimpin oleh Menteri Muda Kehutanan serta bertanggung jawab secara langsung pada Presiden. Sedangkan organisasi pelaksana lapangan dibentuk secara khusus untuk mengantisipasi banyaknya wilayah hutan. Organisasi tersebut dinamakan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang dikepalai oleh Administratur (ADM), yang dibantu oleh seorang pimpinan disebut Asper dengan struktur organisasi BKPH serta di bawahnya disebut RPH. Seorang kepala Asper secara teknis harus menguasai pembangunan kehutanan, sehingga ia mampu berperan sebagai manajer yang menguasai semua kegiatan, seperti produksi, penanaman, perawatan dan pemeliharaan, perlindungan serta fasilitas sosial desa hutan.

Sedangkan bentuk-bentuk usaha perusahaan pengusahaan hutan lain adalah Hak Pengusahaan Hutan/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yaitu hak untuk mengusahakan hutan dalam suatu kawasan hutan yang kegiatan-kegiatannya penebangan kayu, permudaaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sebagai Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asaz kelestarian hutan dan asaz perusahaan (PSAK No. 32, Daftar Istilah)

Perusahaan Pengusahaan Hutan, antara lain HPH/HPHTI memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan (penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran) dan pengelolaan areal HPH/HPHTI yang meliputi: fungsi perencanaan pengusahaan hutan, pengorganisasian perusahaan terutama pendayagunaan tenaga teknis kehutanan dan tenaga profesional pendukung kegiatan pengusahaan hutan, pelaksanaan pengusahaan hutan, perlindungan serta pengamanan hutan (PSAK NO. 32, Par. 03).

Proses produksi hasil hutan untuk mendapatkan kayu bulat memerlukan waktu yang panjang, dimulai dari penanaman, pemeliharaan dan pemungutan, bergantung dari riap (*growth*) tegakan hutan yang akan ditentukan oleh rotasi/daur tanaman. Untuk itu hutan alam dengan silvikultur Tebang Pilih Indonesia (TPTI) diperlukan rotasi tebang 35 (tiga puluh lima). Sedangkan untuk hutan tanaman, daur ditetapkan sesuai dengan kelas perusahaan atau jenis tanaman yang diusahakan untuk *fast growing species*, daur ekonomis paling cepat 8 (delapan) tahun (PSAK No. 32, Par 01).

2. Istilah-Istilah Akuntansi aktivitas kehutanan

Maksud dan tujuan Akuntansi Kehutanan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 32 Par. 05, adalah terwujudnya pembakuan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan, seperti pemegang HPH/HPHTI, berdasarkan asas keterbukaan, sehingga dapat dipergunakan oleh berbagai pihak eksternal seperti instansi yang berwenang dan masyarakat.

Untuk menciptakan keseragaman dan harmonisasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan perlu disusun Akuntansi Kehutanan. Akuntansi Kehutanan ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32. Dengan berlakunya akuntansi kehutanan maka di harapkan:

- a. Terdapat keseragaman dalam praktik-praktik akuntansi dan pelaporan keuangan oleh perusahaan pengusahaan hutan di Indonesia, sehingga mendorong terciptanya laporan keuangan yang berdaya banding.
- b. Laporan keuangan menjadi lebih informatif bagi pihak eksternal yang tidak terlibat langsung dalam perusahaan.
- c. Pemerintah akan dapat memantau perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan (PSAK No. 32, Par. 07).

Dalam bidang kehutanan terdapat beberapa istilah penting dalam mempelajari tentang kehutanan dan pengelolaan hutan. Istilah tersebut antara lain:

- 1) Hutan Tanaman Industri (HTI), yaitu hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

- 2) Iuran Hasil Hutan (IHH), yaitu pungutan yang dikenakan sebagai pengganti sebagian nilai intrinsik pada hasil hutan yang dipungut.
- 3) Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), yaitu pungutan yang dikenakan kepada pemegang hak pengusahaan atas sesuatu kompleks hutan tertentu, pungutan-pungutan mana dilakukan hanya sekali pada saat hak tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Perencanaan Hutan, yaitu penyusunan pola tentang peruntukan, penyediaan pengadaan dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut ruang dan waktu.
- 5) Kelas Perusahaan, yaitu penggolongan usaha dibidang kehutanan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, serta menunjuk kepada jenis kayu pokok yang diusahakan.
- 6) Silvikultur, yaitu cara-cara penyelenggaraan dan pemeliharaan hutan, penerapan teori dan praktik-praktik pengaturan komposisi dan pertumbuhan hutan.
- 7) Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI), yaitu sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan.
- 8) Pengaturan Hasil, yaitu upaya untuk mengatur pemungutan hasil (panenan) agar jumlah hasil yang dipungut setiap periode kurang lebih sama dan dapat diusahakan meningkat secara kesinambungan.
- 9) Etat, yaitu jumlah volume kayu yang dapat dipungut atau jumlah luas areal hutan yang dapat dipanen (ditebang) dalam satu jangka perusahaan atau jangka waktu tertentu sedemikian rupa sehingga terjamin kekekalan kelas perusahaan.
- 10) Kelas umur, yaitu suatu kumpulan atau kelompok hutan yang mempunyai umur sama. Maksudnya, hutan tersebut harus terletak dalam satu areal yang kompak. Sedangkan hutan-hutan yang digolongkan dalam suatukelas umur tidak haru terletak dalam satu areal yang kompak. Lebar interval hutan kelas umur antara satu jenis dan jenis lainnya tidak mempunyai kesamaan yang didasarkan pada kecepatan tumbuh dari jenis tanaman. Semakin cepat pertumbuhan tanaman, misalnya Mahoni, Pinus Dan

Damar, maka semakin kecil intervalnya. Umumnya interval kecil (cepat) tersebut mempunyai kelas umur 5 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa KU I (Kelompok Umur) adalah kumpulan hutan berumur 1 - 5 tahun dan KU II berumur 6 - 10 tahun, dan seterusnya dengan selisih 5 tahun. Sedangkan interval kecil (lambat) untuk pertumbuhan tanaman, misalnya tanaman jati, mempunyai kelas umur (KU I) berumur 1 - 10 tahun dan KU II berumur 10 - 20 tahun, dan seterusnya dengan selisih 10 tahun.

- 11) Riap, yaitu pertambahan volume pohon atau tegakan per satuan waktu tertentu, tetapi adakalanya juga dipakai untuk menyatakan pertambahan nilai tegakan atau pertambahan diameter atau tinggi pohon setiap tahun.
- 12) Bonita/kelas tepat tumbuh, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan produksi suatu tempat tumbuh jenis pohon tertentu, volume atau tinggi rata-rata dari pohon-pohon dominan. Dominasi suatu umur pohon tertentu biasanya digunakan sebagai standar klasifikasi.
- 13) Tegakan, yaitu sekelompok pohon yang mempunyai ciri-ciri seragam mulai dari jenis, umur dan ukuran (diameter, tinggi).
- 14) Peninggi, yaitu tinggi rata-rata sejumlah pohon yang tertinggi dari suatu hutan yang letaknya tersebar merata. Peninggi juga dapat dipakai untuk mengukur kelas kesuburan tanah (*bonita*).
- 15) Daur, yaitu jangka waktu yang diperlukan antara penanaman hutan sampai hutan tersebut dianggap masak untuk dipanen atau umur tebang dari suatu tegakan. Umumnya, daur ini digunakan di suatu pengelolaan hutan yang mempunyai umur sama. Istilah siklus tebang mempunyai pengertian sama dengan daur, tetapi digunakan pada hutan yang tidak sama umurnya atau tidak seumur.

Daur dibedakan menurut jangka waktu (lamanya) sebagai berikut:

- Daur pendek : kurang dari 15 tahun
- Daur Menengah : 15 – 35 tahun
- Daur Panjang : lebih dari 40 tahun.

Pada dasarnya daur yang digunakan adalah daur ekonomis/finansial karena lebih sesuai dengan tujuan perusahaan, selain mempertimbangkan juga

berbagai aspek lain sesuai kondisi sosial ekonomi daerah, tingkat kerawanan sosial dsb. Sebagai pedoman umum daur jenis kayu kelas perusahaan adalah sebagai berikut:

- Jati : 40 – 80 tahun
- Pinus : 35 tahun
- Damar : 20 – 25 tahun
- Mahoni : 30 – 60 tahun
- Meranti : 70 tahun
- Sengon : 20 tahun

16) Reboisasi, yaitu usaha menanam kembali kawasan hutan yang telah lama kosong atau rusak akibat pencurian kayu, kegagalan tanam, pengembalaan liar atau sebab-sebab lain.

17) Penelesaian, yaitu pekerjaan membunuh pohon penyaing atau pohon yang tidak diinginkan dengan cara membuang kulit sepanjang sejengkal (20 cm) termasuk kayu gubal sedalam 1 cm secara bersih, sehingga tidak ada kambium yang tertinggal.

18) Diameter pohon/batang (DBH= *Diameter Breast Height*), yaitu besarnya garis tengah suatu pohon atau batang kayu yang dinyatakan dalam centimeter. Diameter kayu diukur pada garis datar setinggi dada 130 cm di atas tanah untuk pohon tidak berbanir atau 20 cm dari puncak banir bila tinggi banir lebih dari 130 cm.

H. Pengakuan Pendapatan dan Beban untuk Pendapatan dari Hasil Hutan

1. Pendapatan

Pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan operasional Perum Perhutani meliputi pendapatan dari penjualan hasil hutan, baik berupa kayu olahan, hasil tebangan maupun hasil hutan lainnya (PSAK No. 32 Par. 13). Semenjak tahun 2005 Perum Perhutani memisahkan kelola hutan oleh KPH dan kelola bisnis oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM), sehingga mulai tahun 2005 KPH tidak melakukan penjualan hasil hutan kepada pembeli. Produk atau Hasil Hutan tersebut diserahkan kepada

pihak Kesatuan Bisnis Mandiri Pemasaran Kayu (KBMK), dan penjualan dilakukan oleh KBMK. Penyerahan inilah yang diakui sebagai pendapatan oleh pihak KPH. Perum Perhutani KPH Malang menyerahkan kayu atau hasil hutan ke bagian KBM Pemasaran Kayu III Jawa Timur III di Probolinggo.

Pengakuan pendapatan atas hasil hutan diakui dengan dasar akrual, yaitu pada saat transaksi dilaksanakan dan atau penyerahan barang (PSAK. No.32. Par. 14).

Penyerahan hasil hutan yang berupa kayu olahan, kayu tebangan dan hasil hutan lain terdiri dari:

- Kayu olahan : Kayu Gergajian, *Finished Product* dan Kayu Afval
- Kayu tebangan : Kayu Bundar, Kayu Persegi dan Kayu Bakar
- Hasil Hutan Lainnya : Hasil Hutan yang belum/tidak diolah, Hasil Hutan yang diolah, Hasil Hutan Lainnya.

2. Beban

a. Beban Produksi

Beban Produksi adalah rekapitulasi beban-beban untuk memproduksi kayu tebangan, kayu olahan dan hasil hutan lainnya. Pengakuan beban produksi diakui dengan menggunakan dasar akrual (PSAK No. 32 Par. 15), untuk pencatatan adalah pada akun Beban Produksi.

Beban produksi dikelompokan menjadi:

- Beban Produksi Kayu Tebangan adalah beban perencanaan, beban penanaman, beban pemeliharaan hutan, beban pengamanan hutan, beban persiapan eksploitasi kayu, beban produksi kayu tebangan lainnya, beban pemenuhan kewajiban finansial kepada negara dan beban pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial
- Beban Produksi Kayu Olahan adalah beban bahan langsung, beban upah langsung, beban tidak langsung dan beban eksploitasi industri pihak III.
- Beban Produksi Hasil Hutan Lainnya terdiri dari:
 - Beban Produksi Hasil Hutan Yang Belum/Tidak Diolah adalah beban eksploitasi, beban angkutan, upah pekerja harian dan beban pungutan lainnya.

- Beban Produksi Hasil Hutan Lain Yang Diolah adalah beban bahan langsung, beban upah langsung, beban tidak langsung dan beban eksploitasi industri pihak III.
- Beban Produksi Hasil Hutan Lain adalah beban perencanaan, beban eksploitasi, pendidikan dan latihan kerja, pemeliharaan sarana prasarana, beban penyusutan sarana prasarana, beban penelitian dan pengembangan, beban lain produksi.

b. Beban Usaha

Beban usaha merupakan biaya yang dibebankan sehubungan dengan biaya administrasi umum. Beban usaha diakui pada saat pengeluaran dan atau pembebanan. Perlakuan pencatatan Beban Usaha pada akun Beban Usaha.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif, menurut Zuriah (2007:46):

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis”.

Menurut Sugiyono (2009:14), Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta situasi dan aktivitas dari obyek yang diteliti, dimana kegiatan pengumpulan datanya dilakukan sendiri oleh peneliti dan dilakukan bersamaan dengan analisis data. Metode penelitian deskriptif ini memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada sekarang. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis serta selanjutnya menerima alternatif pemecahan masalah yang ada paling sesuai diantara alternatif-alternatif pemecahan yang ada.

Penelitian kuantitatif dengan menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat, yang menjadi obyek penelitian ini, berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tersebut. Pada umumnya penelitian ini menggunakan statistik induktif untuk menganalisis data penelitiannya.

B. Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Malang. Adanya fokus penelitian ini akan memudahkan bagi peneliti untuk membuat keputusan yang jelas dan tepat

mengenai data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis.

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah metode pengakuan pendapatan yang diterapkan pada Perusahaan Umum Kehutanan Negara, alokasi biaya produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Serta proses *matching* dalam menghasilkan laba yang wajar pada tahun 2008.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Perum Perhutani KPH Malang. Jalan dr. Cipto No. 14 Malang. Adapun situs penelitian ini adalah bagian keuangan serta bagian lain yang turut membantu kelengkapan data yang dibutuhkan.

D. Sumber Data

Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono.2009:193). Sumber data primer tersebut diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat berasal dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang berkenaan dengan pengakuan pendapatan dan beban yang diperoleh dari bagian keuangan Perum Perhutani KPH Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono.2009:193). Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen laporan keuangan perusahaan antara lain neraca, laporan laba rugi tahun 2008 serta catatan-catatan resmi, arsip-arsip dan dokumen lain yang tersedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan dua metode:

1. Metode Lapang (*Field Research*)

Metode *field research* adalah suatu bentuk penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, antara lain:

a) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data berusaha mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab atau komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b) Dokumentasi

Dalam hal ini pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas seperti laporan keuangan perusahaan khususnya laporan laba rugi.

2. Metode Kepustakaan (*Research Library*)

Metode kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur atau referensi yang relevan dengan pokok bahasan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Arikunto (2006:160) mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara, yang berisi daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada subyek penelitian dan alat-alat tulis yang akan digunakan untuk menuliskan jawaban yang diterima.
2. Pedoman dokumentasi, yang diperoleh dari format pencatatan, dokumentasi diantaranya laporan keuangan perusahaan, struktur organisasi dan catatan-catatan yang secara keseluruhan berkaitan dengan masalah pengaruh pengakuan pendapatan dan beban terhadap laba pada perusahaan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian (Indrianto, Supomo. 2002:11). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh yang berkaitan dengan masalah perbandingan atas biaya produksi dengan pendapatan serta pengaruhnya terhadap laba pada Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan kemudian diuraikan atau dideskripsikan menurut teori yang telah dikemukakan oleh para ahli.

Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap berikut:

1. Menganalisis metode pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan perusahaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.
2. Menganalisis penerapan *matching concept* dengan mengaitkan biaya produksi dengan pendapatan untuk periode akuntansi yang berkaitan
3. Menganalisis pengaruh penerapan *matching concept* terhadap laba perusahaan untuk tahun berjalan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai acuan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkiprah sejak tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 1972 dengan wilayah kerja pada awalnya kawasan hutan negara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan PP nomor 2 tahun 1978, kawasan wilayah kerjanya diperluas sampai kawasan hutan negara di propinsi Jawa Barat. Tahun 1986, Perum Perhutani mengalami penyesuaian sebagaimana diamanatkan PP nomor 36 tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dan disempurnakan kembali melalui PP nomor 53 tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Pada masa pemerintahan Kabinet Reformasi, sesuai PP nomor 14 tahun 2001, Pemerintah menetapkan Perhutani sebagai BUMN dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Tahun 2003, keberadaan Perhutani sebagai perseroan dikembalikan menjadi Perum karena dengan pertimbangan dari segala aspek. Pengembalian tersebut didasarkan pada PP nomor 30 tahun 2003. Perum Perhutani dalam operasionalnya berada di bawah koordinasi Kementerian Negara BUMN dan dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan. Dalam menjalankan tugasnya Perum Perhutani dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan dan Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Unit kerja di wilayah Perum Perhutani dibagi 3 (tiga) yaitu Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat & Banten. Masing-masing Unit dipimpin oleh seorang Kepala Unit dibantu seorang Wakil Kepala Unit dan Kepala-Kepala Biro. Setiap Unit membawahi beberapa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), Kesatuan Industri Pengolahan Kayu Jati (KIPKJ) dan Kesatuan Pelaksana Ekspor (KPE) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Administratur. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan usaha yang senantiasa berubah dan memerlukan fleksibilitas organisasi yang dinamis, Perum Perhutani

memisahkan kelola hutan oleh KPH dan kelola bisnis oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) yang dipimpin oleh General Manager.

Adapun wilayah hutan yang dikelola Perum Perhutani adalah seluas 2.426.206 hektar, terdiri dari hutan produksi seluas 1,767 juta hektar dan sisanya hutan lindung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Pembagian Luas Wilayah Kerja Perum Perhutani

Unit Kerja	Provinsi	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Total Luas (Ha)
Unit I	Jawa Tengah	546.290	84.430	630.720
Unit II	Jawa Timur	809.959	326.520	1.136.479
Unit III	Jawa Barat	349.649	230.708	580.357
	Banten	61.406	17.244	78.650
	Jumlah	1.767.304	658.902	2.426.206

Sumber data: www.perumperhutani.com

Perum Perhutani Unit II Jawa Timur mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan negara di wilayah Propinsi Jawa Timur. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur mempunyai wilayah kerja 1.136.479 hektar, yang dibagi dalam 23 wilayah ditingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan 5 Kesatuan Bisnis Mandiri Kayu (KBMK). KPH Malang merupakan salah satu KPH yang berada di bawah wilayah Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, dengan luas wilayah 88.848,1 hektar. Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Malang secara Administratif masuk dalam wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang seluas 82.418,20 ha dan Pemerintah Kota Batu seluas 6.429,90 ha. Luas kawasan hutan tersebut dibagi dalam beberapa fungsi dengan rincian 45.007,7 ha (50,70%) berupa Hutan Produksi dan 42.800,5 ha (48,20%) berupa Hutan Lindung, 341,50 ha (0,38%) berupa LDTI dan 698,40 (0,72%) untuk Lain-lain.

KPH Malang dengan luas 88.848,1 hektar mempunyai tiga kelas perusahaan, yaitu Kelas Perusahaan Jati seluas 40.121,70 ha (45,16%), Kelas Perusahaan Pinus seluas 26.508,50 ha (29,84%) dan Kelas Perusahaan Damar seluas 22.217,90 ha (25,00%).

Objek-objek wisata berupa wana wisata banyak ditemui di KPH Malang. Wana wisata adalah objek-objek wisata alam yang dibangun dan dikembangkan oleh Perum Perhutani di dalam kawasan hutan produksi atau hutan lindung secara terbatas dengan tidak mengubah fungsi pokoknya. Di kawasan wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang terdapat banyak pantai antara lain: Pantai Kondang Merak, Pantai Junggring Seloko dan Pantai Bajul Mati. Sedangkan wana wisata yang ada di wilayah pemerintahan Kota Batu antara lain: Air Terjun Coban Rondo, Wisata Payung dan Jagung bakar Songgoriti.

2. Lokasi Perusahaan.

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang merupakan salah satu wilayah kerja Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, kantor Perum Perhutani KPH Malang berada di Pemerintahan Kota Malang di Jalan Dr. Cipto No. 14 Malang. Wilayah kawasan hutan meliputi Pemerintahan Kabupaten Malang dan Pemerintahan Kota Batu.

Batas wilayah pengelolaan hutan KPH Malang adalah:

- Sebelah Utara : KPH Pasuruan
- Sebelah Timur : KPH Probolinggo
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : KPH Kediri dan KPH Blitar

3. Situasi Areal Kawasan Hutan dan Fungsinya.

Kawasan hutan KPH Malang terletak pada ketinggian 0/3.676 meter di atas permukaan laut dan berada di dua wilayah administratif pemerintahan kabupaten Malang dan pemerintahan Kota Batu, dibagi dalam beberapa fungsi hutan yang terdiri dari 52% atau 46.027 hektar diperuntukkan sebagai hutan produksi, dan sisanya 48% atau 42.821 hektar berupa hutan lindung. Untuk lebih jelas disajikan pada tabel. 4.2. berikut:

Tabel 4.2
Perum Perhutani KPH Malang
Kawasan Hutan dan Fungsinya

No	Kawasan	Luas Hutan (ha)				Jumlah (ha)
		Produksi	Lindung	LDTI	Lain-lain (TBP)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Malang	41.808,1	39.682,2	310,9	617,0	82.418,2
2	Batu	3.199,6	3.118,3	30,6	81,4	6.429,9
Total		45.007,7	42.800,5	341,5	698,4	88.848,1

Sumber data: Perum Perhutani KPH Malang 2008

Sedangkan areal produksi hutan untuk jenis produk unggulan KPH Malang akan disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Perum Perhutani KPH Malang
Luas Areal Produksi

No	Bagian Hutan	Jenis Produk	Luas Hutan Produksi (ha)	Ase %
1	2	3	4	5
1	Sengguruh	Jati	40,121.7	45.16
2	Tumpang	Pinus	11,226.3	12.64
3	Kepanjen	Pinus	15,282.2	17.20
4	Ngantang- Pujon	Damar	22,217.9	25.01
Jumlah			88,848.1	100.00

Sumber data : Perum Perhutani KPH Malang 2008

Berdasarkan Luas Areal Produksi tersebut terdapat Pembagian Wilayah Kerja KPH Malang yang terdiri dari:

- 2 waka Adm/KSKPH (KSKPH Malang Barat dan SKPH Malang Timur).
- 8 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)
- 33 Resort Polisi Hutan.

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) atau disebut dengan Administratur. KKPH dibantu oleh 2 orang kepala Sub KPH, 1 orang Kepala Teknik Kehutanan Umum (KTKU), 1 orang Kepala Tata Usaha, serta 7 orang Kepala Bagian KPH dan 24 orang Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH), serta beberapa staf seperti pada lampiran 1.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0936/Kpts/Dir/1993 tanggal 10 September 1993 tentang Uraian Tugas Untuk Pejabat Administratur Perhutani dan Sederajat ke bawah, tugas pokok masing-masing jabatan tersebut adalah:

- 1) Administratur/KKPH
Menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan, pengamanan hutan dan hasil hutan, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.
- 2) Ajun Administratur/KSKPH
Membantu Administratur dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.
- 3) Kepala Teknik Kehutanan Umum (KTKU)
Melaksanakan pekerjaan ketatalaksanaan teknik kehutanan meliputi bidang perencanaan, Humas dan Agraria, pendataan serta evaluasi.
- 4) Kepala Tata Usaha (KTU)
Melaksanakan, mengatur, mengkoordinasikan kegiatan bidang tatausaha meliputi bidang umum, personalia, keuangan dan hasil hutan.
- 5) Asisten perhutani (Asper)/KBKPH
Melaksanakan, mengatur, menyelenggarakan, ketatalaksanaan perusahaan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait di wilayah kerjanya.
- 6) Asisten Teknik Dan Bangunan (Astekbang)
Mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pekerjaan teknik bangunan dan instansi.
- 7) Kepala Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Garahan.

Melaksanakan ketatalaksanaan perusahaan dibidang operasional pabrik gondorukem dan terpentin berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ditetapkan.

8) Kepala Persemaian Permanen Garahan (KPPG)

Melaksanakan, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan persemaian berdasarkan rencana kerja dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

9) Penguji Tingkat I

Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan membina pekerjaan pengujian.

10) Kepala TPK

Melaksanakan, mengatur, membina pekerjaan di TPK dan penjualan serta penyerahan hasil hutan.

11) Kepala Urusan (perencanaan, humas, keamanan dan agraria, data dan informasi, umum, personalia, keuangan, serta hasil hutan)

Melaksanakan, mengatur, dan melakukan koordinasi urusan/bidang pekerjaannya masing-masing.

12) Kepala resort polisi hutan (KRPH)

Membantu Asper dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan teknis dan administrasi kehutanan serta melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.

13) Komandan Regu Polisi Hutan Mobil

Memimpin dan mengatur polisi hutan mobil dalam tugas pengamanan hutan dan hasil hutan.

14) KRPH Kring

Melaksanakan, mengatur dan mengkoordinasi tugas-tugas pengamanan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya.

5. Proses Produksi

a. Tanaman Jati

Proses produksi tanaman jati meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

I. Persemaian

Kegiatan dalam penelitian dan uji coba untuk menghasilkan bibit-bibit tanaman jati yang memiliki hasil yang berkualitas.

II. Penanaman

- Pelaksanaan tanaman dengan persiapan lapangan
- Pelaksanaan tanaman dengan persemaian tahun yang bersamaan dan tahun yang lalu.
- Pelaksanaan tanaman rutin dengan tebangan 1 tahun sebelumnya.

III. Pemeliharaan

Kegiatannya meliputi wiwil (potong ranting), danger tanah, pemberantasan hama penyakit, tunjuk toilet (potong-potong yang kurang berkualitas diberi tanda), tebangan penjarangan E dengan tujuan mendapatkan tegakan tinggal yang kualitasnya baik.

IV. Peneresan

Pekerjaan membunuh pohon penyaing atau pohon yang tidak diinginkan dengan cara membuang kulit sepanjang sejengkal (20cm) termasuk kayu gubal sedalam 1 cm secara bersih, sehingga tidak ada cambium tertinggal. Peneresan khusus dilakukan untuk tanaman jati dengan tujuan agar pada saat penebangan kayu tidak pecah. Teresan dapat dilaksanakan 2 tahun sebelum ditebang habis.

V. Penebangan

Proses perobohan pohon yang telah memasuki kelas umur daur jati yaitu KUIV dan KUV yang telah memasuki daur 30-50 yang merupakan kelas umur siap panen, atau disebut juga tebangan.

b. Tanaman Pinus

Pinus dapat tumbuh antara ketinggian 200-2000 meter dpl dan tidak meminta persyaratan tumbuh tinggi. Pinus berbuah hampir sepanjang tahun terutama bulan Maret sampai dengan Juni. Proses produksi tanaman pinus meliputi:

I. Persemaian

Benih yang berasal dari pohon yang telah berumur 6 tahun atau lebih. Bibit di persemaian kadang-kadang diserang penyakit *dumping off* (jamur). Untuk pencegahannya tanah diusahakan dalam keadaan basah, mengatur drainase dan membuka naungan pada bedengan.

II. Penanaman

Penanaman dengan menggunakan bibit dari persemaian yang berumur 6-8 bulan. Waktu penanaman bibit dilapangan dapat dilakukan mulai bulan Nopember dan selambat-lambatnya bulan Januari.

Jarak tanaman untuk tanaman pinus adalah 3 x 3 m atau 3x 2 m.

III. Pemeliharaan

Tanaman muda di lapangan sebaiknya dihindarkan dari gulma (rumput-rumputan) dan api (kebakaran hutan) terutama sampai umur 15 tahun. Pemeliharaan pinus juga meliputi wiwil, dangir tanah, pemberantasan hama penyakit, tebangan penjarangan E bertujuan untuk mendapatkan tegakan tinggal yang berkualitas baik.

IV. Penebangan

Proses perobohan pohon untuk tanaman pinus dilakukan dalam keadaan basah, jadi tidak dilakukan teresan karena pohon pinus jika diteres maka kualitasnya akan turun karena terserang jamur.

Selain dipungut kayunya, tanaman pinus juga dapat dipungut getahnya dengan cara disadap. Pohon pinus siap disadap getahnya setelah berumur 11 tahun.

c. Tanaman Damar (*Agathis*)

I. Penanaman

Penanaman dilakukan setelah pembuatan lubang tanaman. Lahan yang akan ditanami tidak perlu diolah karena pengolahan tanah dianggap tidak berpengaruh pada pertumbuhan pohon damar yang akan ditanam. Lubang dibuat dengan ukuran panjang dan lebar 30

sampai 50 cm dengan kedalaman 30 cm. Bibit damar yang telah disemaikan di polybag dimasukkan dalam lubang tanam dengan terlebih dahulu diambil plastiknya/polybagnya. Tegakan damar bisa ditanam dengan jarak yang tidak teratur atau bisa juga diberi jarak tanam antara pohon yang satu dengan yang lain menjadi jarang (5-10 m) dan rapat (4-5 m).

II. Penyiangan

Penyiangan atau penebasan dilakukan 1- 2 tahun sekali sampai tanaman berumur sekitar 5 tahun atau tanaman setinggi sekitar 2 meter. Penyiangan I dilakukan pada waktu pembuatan lubang dan selanjutnya dilakukan setiap tahun sampai pohon berumur 5 tahun. Untuk bibit tanaman yang masih muda sampai mempunyai tinggi 2 meter, tebasan harus dilakukan terutama untuk membebaskan tanaman dari gulma. Penyiangan dilakukan pada musim kemarau dan menggunakan cangkul atau parang. Selain berfungsi untuk mengurangi gulma, penyiangan juga berfungsi untuk membersihkan lahan sehingga mudah dilalui pada waktu melakukan penyadapan resin, pemanenan buah, atau melakukan pengawasan repong damar.

III. Penyadapan resin

Penyadapan resin yang paling baik dilakukan setiap 30 hari (1 bulan) sekali. Resin hasil sadapan dengan periode tersebut cukup keras dan mempunyai kualitas terbaik. Apabila penyadapan dilakukan kurang dari 30 hari, resin yang didapat masih lengket sedangkan bila lebih dari 30 hari akan mengurangi produksi resin karena terhambat oleh resin yang mengeras dan masih menempel di pohon tersebut. Penyadapan resin dilakukan dengan membuat lobang berbentuk lingkaran atau segitiga dan pertama kali dilakukan pada pohon yang berdiameter sekitar 20 cm. Jarak tiap lubang sekitar 15 cm tiap deretnya dan jumlah lubang berkisar 8-11 lubang. Tiap pohon dapat dibuat 4 deret lubang atau 3 deret lubang tergantung diameter pohon.

IV. Penebangan

Masa ini merupakan masa pemanenan damar dan umur panen terbaik ada pada kisaran 25 tahun keatas.

6. Kebijakan Akuntansi Perusahaan

a. Kebijakan Umum

Penyajian laporan keuangan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan prinsip biaya historis dengan asumsi akan terus melanjutkan usahanya (Prinsip Kesenambungan) dengan periode akuntansi dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.

b. Kebijakan Khusus

Beberapa kebijakan akuntansi penting yang diterapkan sebagai pedoman akuntansi untuk akun-akun Laporan Keuangan:

1) Piutang

Piutang dicatat atas dasar waktu (basis akrual) dan disajikan Neraca sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan jumlah yang diperkirakan tidak akan dapat ditagih/diterima dan diusulkan penghapusannya, dicatat dalam akun Penyisihan Kerugian Piutang.

2) Persediaan hasil hutan

Persediaan hasil hutan merupakan barang yang berwujud yang siap untuk dijual baik secara langsung maupun setelah melalui proses produksi, yang berupa kayu tebangan, hasil olahan dan atau hasil hutan lain. Nilai persediaan hasil hutan meliputi semua biaya yang timbul sampai persediaan hasil hutan dalam kondisi dan tempat yang siap dijual atau dipakai (*at cost*).

Selama tahun berjalan nilai persediaan hasil hutan mendasarkan pada nilai akhir persediaan hasil hutan untuk tahun sebelumnya.

Apabila terjadi perubahan nilai persediaan tersebut dengan harga pasarnya maka dipilih yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar (*market*). Jika terjadi selisih lebih atau kurang dalam hal penetapan nilai persediaan akhir hasil hutan, selisih tersebut

dimasukkan kedalam Laporan Laba rugi sub-bagian pendapatan dan beban lain-lain.

3) Persediaan perlengkapan kerja

Persediaan perlengkapan kerja merupakan barang berwujud yang tidak dimaksudkan untuk dijual serta diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan, yaitu meliputi suku cadang, sarana industri, sarana produksi dan sarana perusahaan.

Pencatatan persediaan perlengkapan kerja menggunakan metode perpetual dan dinilai dengan rata-rata tertimbang.

Terhadap persediaan perlengkapan kerja yang tidak terpakai lagi dan secara ekonomis tidak bermanfaat lagi, diusulkan penghapusannya dan dicatat dalam akun Persediaan Perlengkapan Kerja yang akan dihapus dalam kelompok aktiva lain-lain.

4) Aktiva tetap dan penyusutannya

Harga perolehan aktiva tetap diakui sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan dari yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva tetap pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aktiva tetap berupa gedung dan bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya. Aktiva tetap bukan gedung dan bangunan disusutkan menggunakan metode declining balance. Dan besar penyusutan untuk tiap-tiap golongan Aktiva tetap (dalam prosentase):

- Bangunan & Prasarana	: 10%
- Peralatan	: 25%
- Kenadaraan	: 25%
- Inventaris	: 50%

Aktiva tetap yang sudah mengalami perubahan sehingga tidak lagi sesuai dengan fungsinya dalam operasi perusahaan, diusulkan penghapusannya dan dicatat dalam akun aktiva tetap yang akan dihapus, disajikan dalam kelompok Aktiva Lain-lain.

5) Pendapatan

Pendapatan diakui dengan menggunakan dasar waktu atau *accrual basis*, yaitu transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas diterima atau dibayar) dicatat dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan, kecuali untuk pendapatan dari penerimaan ganti rugi tegakan hutan yang diterima oleh Perum Perhutani, pada saat diterima dengan dasar tunai atau *cash basis*.

6) Beban

Beban diakui dengan menggunakan dasar *accrual basis*, yaitu biaya yang diakui mempunyai hubungan yang jelas dengan pengakuan pendapatan termasuk estimasi kewajiban yang masih tersisa pada periode yang bersangkutan.

7) Pajak penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas laba perusahaan. Laba perusahaan yang dicantumkan dalam laporan keuangan merupakan laba yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi atau laba akuntansi.

Penetapan pajak penghasilan dilakukan terhadap laba akuntansi setelah koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku secara ekstra komptabel atau laba menurut pajak. Oleh karena pajak penghasilan dihitung dan dibuku sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka tidak terdapat perbedaan waktu pengakuan atau pembebanan pendapatan atau biaya untuk perhitungan pajak dan akuntansi. Dengan demikian tidak terdapat pajak yang ditangguhkan dan beban pajak dalam laporan laba/rugi sebesar hutang pajak yang sesungguhnya. Koreksi yang timbul akibat kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dibukukan atau dibebankan pada tahun berjalan.

7. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan perusahaan/pengusahaan hutan pada dasarnya tidak berbeda dengan jenis perusahaan lain pada umumnya. Laporan keuangan perusahaan hutan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 32 tentang Akuntansi Kehutanan. Akuntansi kehutanan mempunyai maksud dan tujuan agar terwujud perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan perusahaan hutan seperti pemegang HPH/HPHTI, berdasarkan asas keterbukaan, sehingga dapat dipergunakan oleh berbagai pihak ekstern seperti instansi yang berwenang dan masyarakat (PSAK No. 32, Par: 05).

Laporan Keuangan Perusahaan Pengusahaan Hutan terdiri dari:

- 1) Neraca
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Laporan Keuangan Perusahaan bentuk format dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perusahaan Kehutanan digambarkan pada Lampiran 2 dan 3. Neraca Perbandingan Perum Perhutani KPH Malang per 31 Desember 2008 adalah sebagaimana disajikan pada Lampiran 4. Laporan Laba Rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 adalah sebagaimana pada Lampiran 5.

8. Proyeksi Produksi, Pendapatan dan Biaya

a. Proyeksi Produksi

Proyeksi produksi tanaman Jati, dan Rimba (Pinus, Damar, Mahoni, dan Rimba lainnya) didasarkan atas Produktivitas hasil m³ dengan luas lahan kawasan produksi pada tahun yang bersangkutan.

Target produksi kayu KPH Malang tahun 2008 sebesar 24.456 m³ dengan rincian perjenisnya seperti pada lampiran 6. Target produksi tanaman Jati dan Rimba adalah sebagai berikut:

1) Jati

Rencana produksi kayu jati tahun 2008 sebesar 4.395,489 m³ kayu Perkakas dan 308,29 Sm Kayu Bakar.

2) Rimba

Rencana produksi kayu Rimba tahun 2008 sebesar 18.559 m³ Kayu Perkakas dan 1193 Sm Kayu Bakar.

b. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan perusahaan diperoleh dari penyerahan hasil hutan.

Rencana volume penyerahan hasil hutan (dalam m³/ha) tahun 2008 KPH

Malang untuk komoditi Kayu Jati, Kayu Rimba (Damar, Pinus dan Kayu Rimba lainnya), adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perum Perhutani KPH Malang
Rencana Volume Penyerahan Hasil Hutan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008

	Volume
Kayu Perkakas:	
Jati	3.010 m ³
Rimba	17.457 m ³
Kayu Bakar	
Jati	63 Sm
Rimba	157 Sm

Sumber data: Perum Perhutani KPH Malang 2008

Adapun harga rata-rata per m³ penyerahan masing-masing produk kayu tersebut di atas berdasarkan rencana dan realisasinya terdaftar dalam tabel 4.4. Ketentuan harga ini merupakan harga penyerahan KPH, dan bukan harga jual di pasar. Estimasi harga rata-rata penyerahan hasil hutan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perum Perhutani KPH Malang
Estimasi Harga Rata-rata Penyerahan Hasil Hutan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008

	Rencana Rp/m ³	Realisasi Rp/m ³
Kayu Perkakas:		
Jati	Rp.1.553.810	Rp.1.395.500
Rimba:		
Pinus	Rp. 344.526	Rp. 260.676
Mahoni	Rp. 1.070.903	Rp. 749.386
Damar/Agathis	Rp. 589.223	Rp. 510.010
Sonokeling	Rp. 656.162	Rp. 499.907
Gemelina	Rp. 276.458	Rp. 231.948
Sengon	Rp. 333.983	Rp. 285.689
Akasia	Rp. 459.569	Rp. 387.436
Kayu Bakar:		
Jati	Rp. 96.540	Rp. 86.540
Rimba	Rp. 40.380	Rp. 39.240

Sumber data: Evaluasi Hasil Kerja Perum Perhutani KPH Malang 2008

Pendapatan dari penyerahan hasil hutan dan penghasilan lain-lain diperoleh dari penyerahan Kayu bundar dan Kayu persegi Jati, Damar, Pinus, serta Rimba lainnya. Berdasarkan Pengamatan Anggaran Pendapatan KPH Malang tahun 2008, maka proyeksi penyerahan produk Jati dan Rimba adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perum Perhutani KPH Malang
Rencana Pendapatan Penyerahan Hasil Hutan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008

No. Rek	Nama Rekening	Anggaran
Pendapatan	Penyerahan Kayu Tebangan	
921.11	Penyerahan Kayu Bundar Jati	4.469.285.145
921.12	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Pinus	467.996.901
921.13	Penyerahan Kayu Bundar Rimba- Mahoni	4.280.277.242
921.14	Penyerahan Kayu Bundar Rimba- Agathis	1.210.410.128
921.15	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Sonokeling	62.722.855
921.17	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Gemelina	130.264.331
921.21	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Sengon	0
921.23	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Akasia Mangium	0
921.29	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Campur Lainnya	446.850.636
921.31	Penyerahan Kayu Persegi Jati	0
921.32	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Pinus	0
921.33	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Mahoni	0
921.34	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Agathis	0
921.37	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Gemelina	0
921.49	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Campur Lainnya	4.475.095
921.51	Penyerahan Kayu Bakar Jati	4.891.565
921.52	Penyerahan Kayu Bakar Rimba	6.475.095
	Total Penyerahan Hasil Hutan	7.231.398.993

Sumber: Evaluasi Hasil Kerja Perum Perhutani KPH Malang 2008

Total target penerimaan pendapatan dari penyerahan hasil hutan untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 7.231.398.993.

c. Proyeksi Biaya

Pengeluaran Perum Perhutani KPH Malang menurut sifatnya diklasifikasikan menjadi biaya produksi dan biaya usaha. Berdasarkan Pengamatan Anggaran Pengeluaran Perusahaan tahun 2008, maka proyeksi biaya produksi untuk produk utama Perum Perhutani KPH Malang sebagai berikut:

Tabel 4.7
Perum Perhutani KPH Malang
Proyeksi Biaya Produksi
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008

No. Rek	Nama Rekening	Anggaran 1th(Rp)
413.000	BIAYA PENANAMAN	
413.1	Biaya persemaian jati tahun berjalan	49.101.000
413.3	Biaya persemaian rimba tahun berjalan	324.782.000
413.4	Biaya prsmaian rimba utk thun YAD & tahun lalu	104.500.000
413.5	Biaya tanaman rutin jati	26.091.000
413.6	Biaya tanaman pembangunan jati	783.142.000
413.7	Biaya tanaman rutin rimba	5.765.000
413.8	Biaya tanaman pembangunan rimba	1.519.674.000
413.9	Biaya PMDH dalam kawasan	345.199.000
	Total biaya penanaman	3.158.254.000
414.000	BIAYA PERAWATAN HUTAN	
414.1	Biaya perawatan hutan jati	176.611.000
414.2	Biaya perawatan hutan rimba	279.557.000
414.9	Biaya perawatan hutan lainnya	47.800.000
	Total biaya perawatan hutan	503.968.000
415.000	BIAYA PERLINDUNGAN HUTAN	
415.1	Biaya perlindungan terhadap pencurian	97.522.000
415.2	Biaya perlindungan terhadap penggembalaan	704.000
415.3	Biaya perlindungan terhadap kebakaran	0
415.4	Biaya perlindungan terhadap bencana alam	0
415.5	Biaya penyelesaian perkara	29.505.000
415.6	Biaya hukum dan agraria	0
415.7	Biaya sarana & prasarana perlindungan hutan	358.000
415.8	Honorarium pakan dan upah pekerja harian	625.047.000
415.9	Biaya perlindungan hutan lainnya	113.342.000
	Total biaya perlindungan hutan	866.478.000
416.000	BIAYA EKSPLOITASI HASIL TEBANGAN	
416.1	Biaya persiapan eksploitasi kayu jati	54.964.000
416.2	Biaya penerimaan kayu jati	180.785.000
416.3	Biaya pengangkutan kayu jati	465.310.000
416.4	Biaya persiapan eksploitasi kayu rimba	170.521.000
416.5	Biaya penerimaan kayu pertukangan rimba	348.820.000
416.6	Biaya penerimaan kayu rimba campur	0
416.7	Biaya pengangkutan kayu rimba	1.158.966.000
416.9	Biaya eksploitasi hutan lainnya	0
	Total biaya eksploitasi hasil tebang	2.379.366.000
417.000	BIAYA PEMNHAN KWJIBAN KPD NEGARA	
417.1	Iuran hasil hutan (IHH) kayu jati	442.530.000
417.2	Iuran hasil hutan (IHH) kayu rimba	411.793.000
417.3	Iuran hasil hutan (IHH) kayu rimba campur	40.000.000
417.8	Biaya PMDH diluar kawasan	0
	Total biaya pemenuhan kewajiban kepada negara	894.323.000
418.000	BIAYA SARANA & PRASARANA	
418.1	Biaya pemeliharaan sarana & prasarana	405.225.000
418.2	Biaya penyusutan sarana & prasarana	308.634.000
	Total biaya sarana & prasarana	713.859.000
419.000	BIAYA PRDUKSI KYU TEBANGAN LAINNYA	
419.4	Biaya penyuluhan	19.207.000
419.9	Biaya produksi kayu tebang lain	3.460.195.000
	Total biaya produksi kayu tebang lainnya	3.479.402.000
	Total Biaya Produksi Kayu Tebang	11.995.650.000

9. Realisasi Produksi

Produksi Kayu KPH Malang dalam tahun 2008 mencapai 21.610 m³ dari target produksi 24.456 m³ seperti pada lampiran 6, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Jati

Kayu perkakas Jati terealisasi 3.405 m³ dari rencana produksi sebesar 4.395 m³ dan untuk kayu bakar dapat terealisasi 87 Sm dari rencana produksi sebesar 308,29 Sm.

2. Rimba

Produksi kayu perkakas Rimba untuk tahun 2008 terealisasi sebesar 17968 m³ dari rencana produksi kayu perkakas Pinus sebesar 18.559 m³. Kayu bakar Rimba terealisasi 150 Sm dari rencana produksi 1.193 Sm.

B. Analisis Data

1. Analisis Pengakuan Pendapatan

Definisi pendapatan dalam Bab II dijelaskan bahwa pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva dan atau penurunan kewajiban dimana keduanya berasal dari kegiatan normal perusahaan berupa penjualan hasil produksi atau penyerahan barang atau jasa. Pendapatan diakui pada saat realisasinya dimana terdapat suatu aliran masuk berupa sejumlah aktiva (atau juga penyelesaian kewajiban) dari penjualan atau penyerahan produk utama.

Perum Perhutani KPH Malang mengakui pendapatannya atas dasar waktu atau *accrual basis*, yaitu transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas diterima atau dibayar) dicatat dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan PSAK. No. 32 Par. 14 yang menyebutkan pengakuan pendapatan atas hasil hutan diakui dengan dasar akrual, yaitu pada saat transaksi dilaksanakan atau saat penyerahan barang.

Berdasarkan Laporan Rincian Realisasi Pendapatan KPH Malang tahun 2008 diperoleh data realisasi penyerahan untuk komoditi utama Kayu Jati dan Kayu Rimba adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perum Perhutani KPH Malang
Realisasi Pendapatan Penyerahan Hasil Hutan
Untuk periode yang berakhir Desember 2008

No. Rek	Nama Rekening	Realisasi
1	2	3
Pendapatan	Penyerahan Kayu Tebangan	
921.11	Penyerahan Kayu Bundar Jati	4.013.155.676
921.12	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Pinus	965.176.194
921.13	Penyerahan Kayu Bundar Rimba- Mahoni	4.878.462.872
921.14	Penyerahan Kayu Bundar Rimba- Agathis	1.663.653.068
921.15	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Sonokeling	99.981.400
921.17	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Gemelina	306.855.086
921.21	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Sengon	1.222.255
921.23	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Akasia Mangium	387.436
921.29	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Campur Lainnya	662.435.063
921.31	Penyerahan Kayu Persegi Jati	1.866.972
921.32	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Pinus	105.429
921.33	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Mahoni	38.994
921.34	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Agathis	0
921.37	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Gemelina	12.623
921.49	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Campur Lainnya	6.854.381
921.51	Penyerahan Kayu Bakar Jati	2.590.112
921.52	Penyerahan Kayu Bakar Rimba	5.882.326
	Total Penyerahan Hasil Hutan	12.608.679.887

Sumber data: Evaluasi Kerja Perum Perhutani KPH Malang 2008

Untuk perincian penyerahan masing-masing hasil kayu tebangan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Perum Perhutani KPH Malang
Realisasi Penyerahan Kayu Jati
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008

No. Rek	Nama Rekening	Realisasi
921.11	Penyerahan Kayu Bundar Jati	4.013.155.676
921.51	Penyerahan Kayu Bakar Jati	2.590.112
	Total penyerahan Kayu Jati	4.017.612.760

Sumber data: Evaluasi Hasil Kerja Perum Perhutani KPH Malang 2008

Tabel 4.10
Perum Perhutani KPH Malang
Realisasi Penyerahan Kayu Rimba
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008

No. Rek	Nama Rekening	Realisasi
Pendapatan		
921.12	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Pinus	965.176.194
921.13	Penyerahan Kayu Bundar Rimba- Mahoni	4.878.462.872
921.14	Penyerahan Kayu Bundar Rimba- Agathis	1.663.653.068
921.15	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Sonokeling	99.981.400
921.17	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Gemelina	306.855.086
921.21	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Sengon	1.222.255
921.23	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Akasia Mangium	387.436
921.29	Penyerahan Kayu Bundar Rimba-Campur Lainnya	662.435.063
921.31	Penyerahan Kayu Persegi Jati	1.866.972
921.32	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Pinus	105.429
921.33	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Mahoni	38.994
921.34	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Agathis	0
921.37	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Gemelina	12.623
921.51	Penyerahan Kayu Persegi Rimba-Campur Lainnya	6.854.381
921.52	Penyerahan Kayu Bakar Rimba	5.882.326
	Total Penyerahan Hasil Hutan	8.591.067.127

Sumber data: Evaluasi Hasil Kerja Perum Perhutani KPH Malang 2008

Realisasi penyerahan hasil hutan di atas berasal dari volume penyerahan asal hutan komoditi Kayu Jati dan Kayu Rimba sebagai berikut:

1) Kayu Jati

Kayu Perkakas Jati rencana 3.010 m³, realisasi 2.877 m³. Kayu Bakar Jati rencana 63 Sm, realisasi 30 Sm.

2) Kayu Rimba

Kayu Perkakas Rimba rencana 17.457 m³, realisasi 17.968 m³. Kayu Bakar Rimba rencana 167 Sm, realisasi 150 Sm.

Sedangkan untuk rincian realisasi volume hasil kayu tebangan dan realisasi penyerahan hasil kayu tebangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Perum perhutani KPH Malang
Realisasi Volume Hasil Kayu Tebangan dan Penyerahan Hasil Kayu Tebangan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2009

	Realisasi Tebangan	Realisasi Penyerahan
Kayu Perkakas:		
Jati	3405 m ³	2877 m ³
Rimba	17968 m ³	17968 m ³
Kayu Bakar:		
Jati	87 Sm	30 Sm
Rimba	150 Sm	150 Sm

Sumber data: Evaluasi hasil kerja Perum Perhutani KPH Malang 2008

Hasil penyerahan Kayu Jati sebesar senilai Rp. 4.017.612.760. adalah merupakan realisasi penyerahan atas produksi Kayu Perkakas Jati dan Kayu Bakar Jati selama tahun 2008, yaitu sejumlah 2.877 m³ Kayu Perkakas Jati dan 30 Sm Kayu Bakar Jati. Sehingga masih terdapat sisa hasil kayu Jati periode ini yang belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2008, yaitu sebesar 528 m³ Kayu Perkakas Jati dan 57 Sm Kayu Bakar Jati. Hasil Kayu Jati yang belum diserahkan ini oleh Perusahaan diakui sebagai persediaan hasil hutan, yang metode penilaian persediaannya berdasarkan harga penyerahan Kayu Jati Per 31 Desember 2008.

Hasil penyerahan Kayu Rimba senilai Rp. 8.585.184.801 merupakan realisasi penyerahan atas total produksi Kayu Rimba selama tahun 2008, yaitu sebesar 17.968 m³ Kayu Perkakas Jati dan 150 Sm Kayu Bakar Rimba. Perusahaan selanjutnya mencatat transaksi penyerahan untuk tahun 2008 sebagai berikut:

Kas/Piutang usaha	12.608.679.887	
Penyerahan Kayu Jati		4.017.612.760
Penyerahan Kayu Rimba		8.591.067.127
(untuk mencatat penyerahan tahun 2008)		

Jurnal di atas telah memenuhi definisi pendapatan, yaitu dengan adanya kondisi sebagai berikut:

- Peningkatan jumlah aktiva, di mana dalam hal ini terjadi penambahan dalam kas/piutang usaha yang merupakan aktiva.

- Penyerahan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan, yaitu penyerahan produk Kayu Jati dan Kayu Rimba sebagai komoditi utama perusahaan.

Berdasarkan pendekatan kriteria pengakuan pendapatan, transaksi tersebut juga telah menunjukkan suatu kondisi terpenuhinya kriteria sebagai berikut:

- 1) Adanya kepastian harga penyerahan pada saat terjadinya transaksi.
- 2) Terjadinya pertukaran, yaitu antara produk utama perusahaan yang mengalir keluar (*outflow*) dengan masuknya aliran kas (*inflow*).
- 3) Penyerahan Kayu Jati dan Kayu Rimba merupakan peristiwa keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonomi perusahaan, mengingat komoditi ini merupakan produk utama perusahaan.
- 4) Biaya produksi telah dikeluarkan dan telah dapat ditentukan pada periode yang berkaitan.

2. Analisis Pengakuan Beban

Definisi beban seperti telah diuraikan dalam konsep beban pada Bab II, adalah pemakaian aktiva atau kenaikan kewajiban atau keduanya yang digunakan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan normal perusahaan.

Perum perhutani KPH Malang mengakui beban dengan menggunakan dasar *accrual basis*, yaitu biaya diakui mempunyai hubungan yang jelas dengan pengakuan pendapatan termasuk estimasi kewajiban yang masih tersisa pada periode bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan khusus perusahaan dan PSAK No. 32 Par: 15.

Biaya-biaya yang terjadi selama periode akuntansi dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya produksi, menampung biaya yang terjadi untuk tanaman baru pada tahun berjalan, pemeliharaan tanaman tahun lalu, biaya perlindungan, biaya eksploitasi hasil hutan dan biaya produksi kayu tebangan lainnya.

Adapun biaya-biaya produksi yang dikeluarkan untuk produk utama kayu tebangan (Jati dan Rimba), seperti pada lampiran 6 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.12
Perum Perhutani KPH Malang
Realisasi Biaya Produksi Kayu Jati
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2008

No. Rek	Nama Rekening	Realisasi
413.000	BIAYA PENANAMAN JATI	
413.1	Biaya persemaian jati tahun berjalan	37.152.731
413.5	Biaya tanaman rutin jati	4.038.905
413.6	Biaya tanaman pembangunan jati	765.540.874
413.9	Biaya PMDH dalam kawasan	366.148.325
	Total biaya penanaman	1.172.880.835
414.000	BIAYA PERAWATAN HUTAN JATI	
414.1	Biaya perawatan hutan jati	21.026.730
414.9	Biaya perawatan hutan lainnya	70.742.600
	Total biaya perawatan hutan	91.769.330
415.000	BIAYA PERLINDUNGAN HUTAN JATI	
415.1	Biaya perlindungan terhadap pencurian	112.657.605
415.2	Biaya perlindungan terhadap penggembalaan	1.700.000
415.3	Biaya perlindungan terhadap kebakaran	0
415.4	Biaya perlindungan terhadap bencana alam	5.149.000
415.5	Biaya penyelesaian perkara	122.842.450
415.6	Biaya hukum dan agraria	95.130.834
415.7	Biaya sarana dan prasarana perlindungan hutan	0
415.8	Honorarium pakan dan upah pekerja harian	830.939.608
415.9	Biaya perlindungan hutan lainnya	108.781.043
	Total biaya perlindungan hutan	1.277.200.540
416.000	BIAYA EKSPLOITASI HASIL TEBANGAN JATI	259.479.018
416.1	Biaya persiapan eksploitasi kayu jati	151.684.793
416.2	Biaya penerimaan kayu jati	483.382.757
416.3	Biaya pengangkutan kayu jati	0
416.9	Biaya eksploitasi hutan lainnya	894.546.568
	Total biaya eksploitasi hasil tebangan	
417.000	BIAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN KPD NEGARA	
	Iuran hasil hutan (IHH) kayu jati	336.506.150
417.1	Biaya PMDH di luar kawasan	0
717.8	Total biaya pemenuhan kewajiban kepada negara	336.506.150
	BIAYA SARANA & PRASARANA	
418.000	Biaya pemeliharaan sarana & prasarana	822.833.346
418.1	Biaya penyusutan sarana & prasarana	374.134.477
418.2	Total biaya sarana & prasarana	1.196.967.823
	BIAYA PRODUKSI LAINNYA	
419.000	Biaya penyuluhan	18.845.950
419.4	Biaya produksi kayu tebangan lain	4.028.117.866
419.9	Total Biaya Produksi Lainnya	4.226.963.816
TOTAL BIAYA PRODUKSI KAYU TEBANGAN		9.196.835.062

Sumber : Evaluasi Hasil Kerja Perum Perhutani KPH Malang 2008

Tabel 4.13
Perum Perhutani KPH Malang
Realisasi Biaya Produksi Kayu Rimba
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2008

No. Rek	Nama Rekening	Realisasi
413.000	BIAYA PENANAMAN RIMBA	
413.3	Biaya persemaian rimba thn berjalan	161.830.286
413.4	Biaya persemaian rimba u/ thn YAD & thn lalu	104.532.247
413.7	Biaya tanaman rutin rimba	8.154.975
413.8	Biaya tanaman pembangunan rimba	1.470.049.714
	Total biaya penanaman	1.744.567.222
414.000	BIAYA PERAWATAN HUTAN	
414.2	Biaya perawatan hutan rimba	186.083.383
	Total biaya perawatan hutan	186.083.383
416.000	BIAYA EKSPLOITASI HSIL TEBANGAN	
416.4	Biaya persiapan eksploitasi kayu rimba	371.567.562
416.5	Biaya penerimaan kayu pertukangan rimba	374.441.015
416.6	Biaya penriman ky pertkangn rimba campur	35.349.748
416.7	Biaya pengangkutan kayu rimba	1.747.039.547
	Total biaya eksploitasi hasil tebangan	2.528.397.872
417.000	BIAYA PMNUHN KEWJIBAN KPD NGR	
417.2	Iuran hasil hutan (IHH) kayu rimba	290.913.340
417.3	Iuran hasil hutan (IHH) kayu rimba campur	32.298.530
	Total biaya pemnuhan kewajiban kpd negara	323.211.870
Total Biaya Produksi Kayu Tebangan		4.782.260.347

Sumber data: Evaluasi Hasil Kerja Perum Perhutani KPH Malang 2008

Tanaman hutan memerlukan jangka waktu atau daur yang lama sampai dengan siap tebang. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tanaman hutan seperti penanaman, pemeliharaan dan seterusnya dibukukan sebagai biaya dalam periode akuntansi yang bersangkutan sehingga biaya tidak diakumulasi sampai tanaman menghasilkan.

Perusahaan mencatat biaya produksi tanaman Jati dan Rimba untuk Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1) Jati

Biaya Penanaman	Rp. 1.172.880.835
Biaya Perawatan Hutan	Rp. 91.769.330
Biaya Perlindungan Hutan	Rp. 1.277.200.540
Biaya Eksploitasi Hasil Tebangan	Rp. 894.546.568
Biaya Kepada Negara	Rp. 336.506.150
Biaya Sarana & Prasarana	Rp. 1.196.967.823
Biaya Produksi Lainnya	Rp. 4.226.963.816
Kas	Rp. 9.196.835.062
(untuk mencatat biaya produksi Kayu Jati tahun 2008)	

2) Rimba

Biaya Penanaman	Rp. 1.744.567.222
Biaya Perawatan Hutan	Rp. 186.083.383
Biaya Eksploitasi	Rp. 2.528.397.872
Biaya Kepada Negara	Rp. 323.211.870
Kas	Rp. 4.782.260.347
(untuk mencatat biaya produksi Kayu Rimba tahun 2008)	

b. Biaya Usaha

Biaya usaha, menampung biaya atau beban yang terjadi dalam operasional perusahaan. Biaya usaha yang terjadi di Perum Perhutani KPH Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Perum Perhutani KPH Malang
Realisasi Biaya Usaha
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2008

No. Rek	Nama Rekening	Realisasi
	Biaya Umum Dan Administrasi	
531.91	Tunjangan Pajak	7.805.200
534.11	Biaya Harian	83.057.869
534.41	Biaya Harian	5.665.500
534.61	Tunjangan Jalan Tetap	190.692.000
534.71	Biaya Pindah	48.444.300
434.81	Transport Menuju Ke Kantor	293.050.000
535.21	Biaya Pendidikan Di Luar Pehutani	0
536.11	Pembelian Alat-Alat Tulis	72.673.237
536.21	Biaya Percetakan Blanko	38.403.084
536.31	Biaya Fotocopy	7.406.410
536.41	Biaya Langganan Keperluan Dinas	81.753.939
536.51	Biaya Jamuan Rapat	75.019.250
536.52	Biaya Tamu Dinas	176.983.275
536.61	Biaya Pengiriman Dokumen Dinas	5.176.500
536.71	Biaya Perlengkapan Kerja	0
536.81	Biaya Upah Pekerja Harian	177.639.178
536.82	Biaya Upah Pegawai Kontrak Kerja	55.940.808
536.91	Biaya Bank	5.789.000
536.92	Biaya Keperluan Kebersihan Kantor	80.590.200
536.99	Biaya Kantor Lain-Lainnya	3.000.000
	Total Biaya Umum dan Administrasi	1.409.090.000
	Biaya Di Luar Usaha Pokok	
621.21	Biaya Administrasi Bank Pemerintah	4.760.301
629.99	Biaya Lain-lain Usaha Di Luar Usaha Pokok	18.636.776
	Total Biaya Di Luar Usaha Pokok	23.397.077

Sumber: Evaluasi Kerja Perum Perhutani KPH Malang 2008

Secara umum kedua kelompok biaya tersebut, yaitu biaya produksi dan biaya usaha telah memenuhi kriteria defintif sebagai berikut:

- 1) Adanya pemakaian aktiva, yaitu kas perusahaan.
- 2) Aktiva berupa kas tersebut digunakan dalam usaha menghasilkan pendapatan.
- 3) Seluruh aktivitas usaha yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut terjadi dalam suatu periode akuntansi, yaitu tahun 2008.
- 4) Terjadinya aktivitas tersebut merupakan kegiatan normal perusahaan.

3. Analisis Penerapan *Matching Concept*

Beberapa pernyataan tentang *matching concept* pada hakekatnya menyebutkan bahwa konsep ini merupakan pemikiran logis yang melandasi proses pengakuan beban berdasarkan hubungan sebab akibat dengan pendapatan dalam rangka penentuan laba rugi yang wajar dalam suatu periode akuntansi.

Berdasarkan analisis pengakuan pendapatan dan analisis pengakuan beban selanjutnya dapat dilakukan analisis penerapan *matching concept* untuk perusahaan pada tahun 2008. Biaya produksi untuk tahun ini terjadi karena adanya produksi komoditi utama perusahaan, yaitu Kayu Jati dan Rimba. Sedangkan pendapatan yang diperoleh perusahaan untuk tahun 2008 adalah hasil penyerahan dari produk Kayu Jati dan Kayu Rimba.

Berdasarkan kondisi dan fakta yang terjadi pada Perum Perhutani KPH Malang, dilakukan penerapan *matching concept* sebagai berikut:

- 1) Tahun 2008, KPH Malang melakukan penyerahan produk kayu jati ke KBM Probolinggo sebesar 2.877 m³ Kayu Perkakas Jati dan 30 Sm Kayu Bakar Jati dengan pengakuan pendapatan dari hasil penyerahan senilai Rp. 4.017.612.760. Biaya produksi Kayu Jati tahun 2008 adalah sebesar Rp. 9.196.835.062, dengan hasil produksi 3.405 m³ kayu perkakas dan 87 Sm kayu bakar. Biaya produksi tersebut diakui seluruhnya pada periode yang sama dengan pengakuan pendapatan dari hasil penyerahan hasil Kayu Jati pada tahun ini. Dalam rangka penerapan *matching concept* seharusnya biaya produksi yang diakui sebagai beban untuk tahun 2008 adalah hanya sebesar bagian yang diserahkan ke KBM, yaitu dari produksi sebesar 2.877

m³ kayu perkakas dan 30 Sm kayu bakar. Dengan biaya produksi tiap m³ sebesar sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Biaya produksi per m}^3 \text{ kayu jati} &= \frac{9.196.835.062}{(3405+87)} \\ &= 2.633.687 \end{aligned}$$

Jadi biaya produksi per m³ kayu jati adalah Rp. 2.633.687, maka bagian biaya produksi yang diakui pada tahun 2008 seharusnya Rp.7.656.128.167. Pada pengakuan biaya produksi dan pendapatan dari produk Kayu Jati ini, *matching concept* kurang dapat diterapkan secara layak karena produk tidak seluruhnya diserahkan.

- 2) Hasil produksi Kayu Rimba di Perum Perhutani KPH Malang pada tahun 2008 adalah sebesar 17.968 m³ Kayu Perkakas Rimba dan 150 Sm Kayu Bakar Rimba, dengan biaya produksi senilai Rp. 4.782.260.347. Pada tahun 2008 produksi Kayu Rimba diserahkan seluruhnya ke KBM dengan pengakuan pendapatan senilai Rp. 8.591.067.127. *Matching concept* dalam hal ini dapat diterapkan dengan layak pada pengakuan biaya produksi dan pendapatan dari produksi Kayu Rimba.

4. Penyajian Penerapan *Matching Concept* dalam Pelaporan Laba

Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba dapat ditentukan dengan menghitung selisih pendapatan dan biaya berdasarkan stelsel akrual dan sesuai dengan konsep *matching of cost with revenue*. Seperti telah diuraikan dalam analisa pengakuan pendapatan bahwa penetapan pendapatan dilakukan berdasarkan konsep pembentukan dan realisasi. Konsep yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat pendapatan telah terbentuk atau pada periode penjualan atau penyerahan barang. Untuk menghitung laba maka pendapatan dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk pendapatan tersebut.

Berdasarkan analisis penerapan *matching concept* di atas, dan dalam hubungannya dengan penentuan laba perusahaan terdapat kondisi dan fakta bahwa biaya produksi untuk sebagian hasil tebang Jati yang tidak diserahkan ke KBM pada tahun 2008 tetap diakui dan dikurangkan terhadap

pendapatan dari hasil penyerahan Jati dan Rimba, meskipun biaya-biaya ini tidak memberikan kontribusi pada pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Tentunya hal ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah laba.

Pengaruh biaya-biaya tersebut terhadap laba dapat diketahui dengan analisis menggunakan perhitungan laba/rugi kotor untuk tahun 2008 seperti pada tabel 4.15 dan tabel 4.16. Pada tabel 4.15 ditunjukkan bahwa perhitungan rugi kotor sesuai dengan pengakuan perusahaan adalah sebesar minus Rp. 619.141.701. Selanjutnya pada tabel 4.16 adalah perhitungan laba/rugi kotor setelah mengeluarkan komponen biaya yang seharusnya tidak diakui pada tahun 2008 berdasarkan perhitungan biaya yang telah dilakukan pada analisis sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan mengurangi seluruh biaya produksi Kayu Jati sebesar Rp.1.540.706.895 dari total biaya produksi seluruhnya, biaya ini merupakan biaya untuk produksi Kayu Jati yang belum diserahkan pihak KPH Malang kepada pihak KBM dengan perincian, Kayu Perkakas Jati sebanyak 528 m³ dan 57 Sm Kayu Bakar Jati dikalikan dengan biaya tiap m³ Kayu Jati sebesar Rp. 2.633.687. Perhitungan setelah diterapkan *matching concept* menghasilkan laba kotor sebesar Rp.921.565.194.

Kedua perhitungan di atas memperlihatkan bahwa laba/rugi kotor yang diakui perusahaan pada tahun 2008 adalah lebih rendah dari laba kotor hasil penerapan *matching concept*, dengan selisih perhitungan laba kotor sebesar Rp.1.540.706.895. Dalam penelitian ini, perhitungan laba hanya dihitung sampai pada laba/rugi kotor karena dianggap telah dapat diterapkannya *matching concept*, dimana *matching concept* adalah perbandingan antara pendapatan dan biaya produksi dan dari sini sudah dapat diketahui hasil penerapan *matching concept*. Selanjutnya untuk perhitungan laba/rugi bersih dapat mengikuti dari hasil analisis tersebut.

Berdasarkan dari hasil analisis penerapan *matching concept* dan pengaruhnya terhadap laba di atas, dapat diartikan bahwa laba perusahaan yang disajikan dalam laporan laba/rugi labanya adalah lebih rendah. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan penerapan *matching concept*, laba yang diakui untuk periode ini adalah terlalu rendah (*understated*). Dengan

demikian laba perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2008 tidak mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Tabel 4.15
Perum Perhutani KPH Malang
Perhitungan L/R Kotor untuk Hasil Hutan Kayu Jati dan Rimba
Untuk Periode yang berakhir Desember 2008

Uraian	Hasil Hutan Kayu Tebangan (Rp)
Penyerahan Hasil Hutan	Rp. 12.608.679.887
Harga Pokok Penjualan:	
Biaya Penanaman	Rp. 2.917.448.057
Biaya Perawatan	Rp. 277.852.713
Biaya Perlindungan	Rp. 1.277.200.540
Biaya Eksploitasi	Rp. 3.422.944.440
Biaya Finansial	Rp. 659.718.020
Biaya Sarpra	Rp. 1.196.967.823
Biaya Lain-Lain	<u>Rp. 4.226.963.816</u>
Biaya Produksi	Rp. 13.979.095.409
Persediaan Awal hasil Hutan	<u>Rp. 26.540.811</u>
Harga Pokok Produksi siap jual	Rp. 14.005.636.220
Persediaan Akhir hasil Hutan	<u>Rp. 777.814.632</u>
Harga Pokok Penjualan:	<u>Rp.13.227.821.588</u>
L/R Kotor	(Rp. 619.141.701)

Tabel 4.16
 Perum Perhutani KPH Malang
 Penerapan MC terhadap Perhitungan L/R Kotor untuk HH Kayu Jati dan Rimba
 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2008

Uraian	HH Kayu Tebangan (Rp)	Adjustment	Adjusted
Penyerahan Hasil Hutan	Rp. 12.608.679.887		Rp. 12.608.679.887
Harga Pokok Penjualan:			
Biaya Penanaman	Rp. 2.917.448.057		Rp. 2.917.448.057
Biaya Perawatan	Rp. 277.852.713		Rp. 277.852.713
Biaya Perlindungan	Rp. 1.277.200.540		Rp. 1.277.200.540
Biaya Eksploitasi	Rp. 3.422.944.440		Rp. 3.422.944.440
Biaya Finansial	Rp. 659.718.020		Rp. 659.718.020
Biaya Sarpra	Rp. 1.196.967.823		Rp. 1.196.967.823
Biaya Lain-Lain	<u>Rp. 4.226.963.816</u>		<u>Rp. 4.226.963.816</u>
Biaya Produksi	Rp. 13.979.095.409	(Rp.1.540.706.895)	Rp. 12.438.388.514
Prsdiaan Awal hsl Hutan	<u>Rp. 26.540.811</u>		<u>Rp. 26.540.811</u>
Hrg Pkk Prdksi siap jual	Rp. 14.005.636.220		Rp. 12.464.929.325
Prsdiaan Akhr Hsl Hutan	<u>Rp. 777.814.632</u>		<u>Rp. 777.814.632</u>
Harga Pokok Penjualan:	<u>Rp.13.227.821.588</u>		<u>Rp.11.687.114.693</u>
L/R Kotor	(Rp. 619.141.701)		Rp. 921.565.194

BAB V PENUTUP

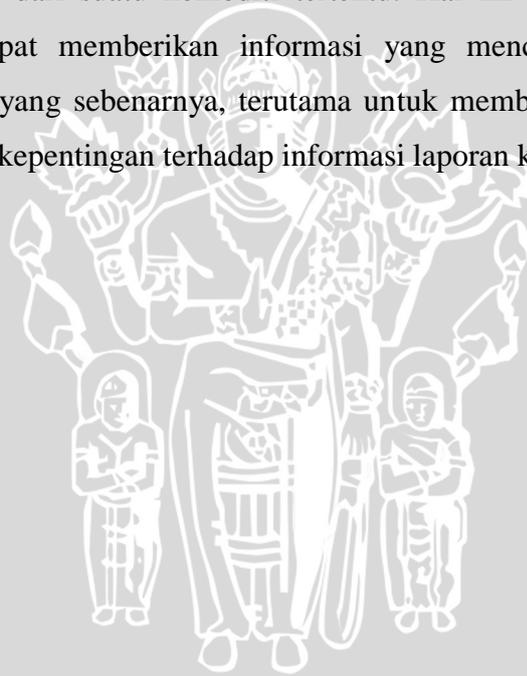
A. KESIMPULAN

1. Perum Perhutani KPH Malang mengakui pendapatannya atas dasar waktu atau *accrual basis*, yaitu transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas diterima atau dibayar) dicatat dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan PSAK. No. 32 Par. 14, yang menyebutkan pengakuan pendapatan atas hasil hutan diakui dengan dasar akrual, yaitu pada saat transaksi dilaksanakan atau saat penyerahan barang.
2. Perum perhutani KPH Malang mengakui beban dengan menggunakan dasar *acrual basis*, yaitu biaya diakui mempunyai hubungan yang jelas dengan pengakuan pendapatan termasuk estimasi kewajiban yang masih tersisa pada periode bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan khusus perusahaan dan PSAK No. 32 Par: 15.
3. Berdasarkan hasil analisis, penerapan *matching concept* pada produksi Kayu Jati dan Rimba, sebagai berikut:
 - a. *Matching concept* kurang layak diterapkan sepenuhnya pada produksi Kayu Jati, karena biaya produksi sebesar Rp.1.540.706.895 diakui pada tahun berjalan sementara ada bagian produk Kayu Jati sebanyak 528 m³ Kayu Perkakas dan 57 Sm Kayu Bakar yang tidak memberikan kontribusi pada pendapatan di tahun tersebut.
 - b. *Matching concept* pada produksi Kayu Rimba dapat diterapkan secara layak dengan diakuinya seluruh biaya produksi yang dapat dikaitkan dengan seluruh total kontribusi pendapatan dari produk Kayu Rimba.
4. Pengaruh penerapan *matching concept* terhadap penyajian laba pada Perum Perhutani KPH Malang, yaitu setelah diterapkannya *matching concept* diketahui laba perusahaan lebih tinggi sebesar Rp. 921.565.194,- sedangkan sebelum diterapkannya *matching concept* laporan laba rugi Perum Perhutani KPH Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 619.141.701. Dengan demikian, laba perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk tahun 2008

lebih rendah dari yang sebenarnya karena telah diakuinya biaya produksi yang tidak memberikan kontribusi pada pendapatan pada tahun 2008. Hal ini menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

B. SARAN

Dengan tidak dapat diterapkannya *matching concept* secara sempurna dalam proses pengakuan biaya produksi terhadap pendapatan yang diterima oleh Perum Perhutani KPH Malang, maka dalam hal ini perusahaan haruslah melakukan *full disclosure* (pengungkapan penuh) yang memadai dan yang menjelaskan hal-hal khusus yang terjadi diluar operasi normal perusahaan seperti yang terjadi pada tahun 2008 ataupun periode-periode yang lain dimana tidak ada kontribusi pendapatan dari suatu komoditi tertentu. Hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya, terutama untuk memberi kejelasan pada para pemakai yang berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan tersebut.



Daftar Pustaka

- Arief, Arifin. 2005. *Hutan Dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Baridwan, Zaki. 1999. *Intermediate Accounting Edisi Tujuh*. Yogyakarta: BPFE.
- Belkaoui, Ahmad Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dyckman, Thomas. Roland E. Dukes and Charles J. Davis. 2000. *Akuntansi Intermediate Edisi Tiga*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi Edisi Tiga*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sofyan Syafri B.S.Ac. 2004. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendriksen, Eldon S. 1991. *Teori Akuntansi Edisi Keempat*. Jakarta : Erlangga.
- Horngren, Charles. Harisson Jr, Walter and Bamber, Linda S. 2005. *Accounting*. New Jersey: Pearson Education International.
- Humas Perhutani. 2009. *Profil Perum Perhutani Perhutani Hijau 2010*. Diakses pada tanggal 20 Juli 2009 dari <http://www.perumperhutani.com>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Kieso, Donald. Jerry Weygandt dan Paul D. Kimmey. 2007. *Accounting Principles Edisi Tujuh*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusnadi, Sjamsudin dan Kertahadi. 2001. *Teori Akuntansi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawir. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: LIBERTY Yogyakarta.
- Salim, H.S. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemarso. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.

Wareen, Carl. Reeve, James M. And Fees, Philip E. 1999. *Accounting*. United States Of America: international Thomson Publishing.

Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

